

**MANAJEMEN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DALAM
PELESTARIAN BUDAYA KESENIAN MUSIK GAMBUS
LAMPUNG BARAT**

Tesis

Oleh

NADIA KHUMAIRATUN NISA

NPM 2226021017



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

**MANAJEMEN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DALAM
PELESTARIAN BUDAYA KESENIAN MUSIK GAMBUS
LAMPUNG BARAT**

Oleh

NADIA KHUMAIRATUN NISA

NPM 2226021017

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

MANAJEMEN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DALAM PELESTARIAN BUDAYA KESENIAN MUSIK GAMBUS LAMPUNG BARAT

Oleh

NADIA KHUMAIRATUN NISA

Permasalahan penelitian ini adalah hilangnya eksistensi kesenian musik gambus Lampung Barat selama kurun waktu dua dekade (2000-2017) akibat tidak adanya inisiasi pemerintah dalam memaksimalkan peranan untuk menghadirkan kegiatan pelestarian budaya serta tidak adanya wadah bagi aktor untuk berkolaborasi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji atau menganalisis manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat dilihat dari aspek konteks sistem, *drivers* (pendorong), dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, dampak dan adaptasi kolaborasi, serta masalah manajemen pemerintahan kolaboratif. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang melibatkan 5 (lima) orang informan meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Budayawan/Pemerhati Budaya, Sanggar Banjar Masin, dan Sanggar Andan Muakhi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat telah memenuhi dimensi manajemen pemerintahan kolaboratif. Aktor kolaborasi memiliki keterkaitan untuk memfasilitasi anggaran dan event kebudayaan, pendampingan sanggar orkes gambus dan pendataan, serta menjaga aktivitas kesenian musik gambus di masyarakat. Kelemahan dalam proses kolaborasi ini belum didukung pengaturan prosedural. Adapun masalah manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat adalah kesalahpahaman (*missunderstanding*) yang muncul akibat perbedaan budaya antar aktor kolaborasi yang kurang sensitif terhadap komunikasi lintas budaya, dinamika manajemen administrasi pemerintah yang tidak sederhana, dan egoisme terhadap cara pandang dan kepentingan aktor kolaborasi.

Kata Kunci: Manajemen Pemerintahan Kolaboratif, Pelestarian Budaya, Kesenian Musik Gambus

ABSTRACT

COLLABORATIVE GOVERNANCE MANAJEMENT IN THE PRESEVATION OF WEST LAMPUNG'S GAMBUS MUSICAL ART CULTURE

By

NADIA KHUMAIRATUN NISA

The problem addressed in this research is the loss of existence of the West Lampung gambus music artistry over a period of two decades (2000-2018) due to the lack of government initiation in maximizing its role in bringing about cultural preservation activities, as well as the absence of a platform for actors to collaborate. The aim of this study is to examine or analyze collaborative government management in the preservation of the West Lampung gambus music artistry culture, viewed from the aspects of contextual system, drivers, collaboration dynamics, collaborative actions, impacts and adaptations of collaboration, as well as problems in collaborative government management. The research type is descriptive qualitative, employing primary data collection techniques involving 5 informants comprising the Department of Education and Culture, the Department of Youth, Sports, and Tourism, Cultural Scholars/Enthusiasts, Banjar Masin Studio, and Andan Muakhi Studio. Data analysis is conducted through stages of data reduction, presentation, and verification. The research findings indicate that the preservation of the West Lampung gambus music artistry culture has fulfilled the dimensions of collaborative government management. Collaborative actors are interconnected to facilitate cultural budgeting and events, accompany gambus orchestra studios and data collection, as well as sustain gambus music artistry activities within the community. Weaknesses in this collaboration process are not supported by procedural regulations. The issues in collaborative government management in preserving the West Lampung gambus music artistry culture include misunderstanding arising from cultural differences among collaborative actors who are less sensitive to cross-cultural communication, the dynamics of government administrative management that are not straightforward, and egoism regarding the perspectives and interests of collaborative actors.

Keywords: Collaborative Governance Management, Cultural Presevation, Gambus Music Art

Judul Tesis : **MANAJEMEN PEMERINTAHAN
KOLABORATIF DALAM PELESTARIAN
BUDAYA KESENIAN MUSIK GAMBUS
LAMPUNG BARAT**

Nama Mahasiswa : **Nadia Khumairatun Nisa**

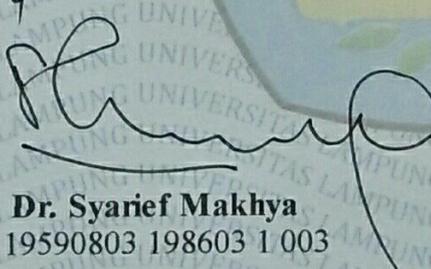
NPM : **2226021017**

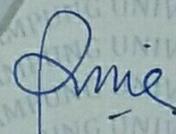
Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

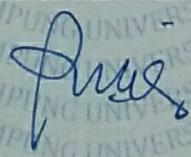


1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Syarief Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003


Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

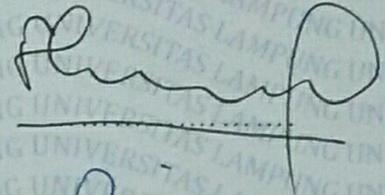

Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

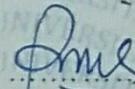
Ketua

Prof. Dr. Syarief Makhya



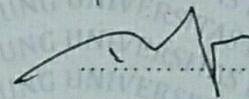
Sekretaris

Dr. Feni Rosalia, M.Si.



Penguji Utama

Dr. Pitojo Budiono, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **11 Juni 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Manajemen Pemerintahan Kolaboratif dalam Pelestarian Budaya Kesenian Musik Gambus Lampung Barat” adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Juni 2024



... membuat pernyataan,

Nadia Khumairatun Nisa
Nadia Khumairatun Nisa
NPM. 2226021017

RIWAYAT HIDUP



Nadia Khumairatun Nisa, lahir di Purbalingga, 07 Oktober 2000 buah hati dari pasangan Ayahanda “**Ahmad Mauluddin**” dan Ibunda “**Kurniya Wati**”.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal tahun 2005-2006. Kemudian tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan di SDN 02 Sebarus dan diselesaikan tahun 2012. Pada tahun yang sama

penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas di SMP Negeri 1 Liwa hingga lulus tahun 2015 dan di SMA Negeri 1 Liwa yang diselesaikan tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis diterima sebagai salah satu mahasiswa di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Alhamdulillah selesai tahun 2022 dengan predikat *cumlaude* dan Lulusan Terbaik ke-3 tingkat fakultas. Alhamdulillah pada tahun yang sama yaitu 2022, penulis kembali diberikan amanah untuk melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan (konsentrasi Manajemen Pemerintahan) melalui jalur masuk Beasiswa Universitas Lampung.

Semasa kuliah penulis aktif dalam beberapa kegiatan kepenulisan dan sosial di antaranya:

1. Artikel Ilmiah pada Jurnal Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan (Sinta 3) berjudul “Gerakan World Cleanup Day sebagai Wujud Kepedulian terhadap Lingkungan Hidup” tahun 2023.

2. Artikel Ilmiah pada Jurnal Perspektif (Sinta 3) berjudul “*Collaborative Governance* Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung” tahun 2023.
3. *Internasional Proceeding* berjudul:
 - a. “*Policy Model for Utilizing Green Open Space in Bandar Lampung City Development*” tahun 2022.
 - b. “*The Manifestation of The Lampung Community Philoshophy of Life in The Traditional Architecture of Lamban Gedung Paksi Buay Pernong*” tahun 2022.
 - c. “*Local Wisdom ‘Piil Pesengiri’ from Lampung as a Filter for Radicalism*” tahun 2022.
 - d. “*Azerbaijan (Caucasus-Central Asia) Tourism Strategy in Foreign Trade and Logistics*” tahun 2022.
4. Opini pada Surat Kabar harian Momentum tahun 2023 berjudul:
 - a. Tradisi *Ngantak Sesuduk/Ngantak Bakul* sebagai Modal Sosial Masyarakat
 - b. *Sekura Cakak Buah*: Strategi Merawat Solidaritas Sosial
 - c. Orkes Gambus Khas Lampung: Wadah Silaturahmi Masyarakat
 - d. Apa Kabar Bahasa Lampung? Masihkah Eksis di Tanahnya?
 - e. Arsitektur Tradisional Lampung pada Makna dan Eksistensi
 - f. Indonesia Menyongsong 2045 dalam Realitas Desentralisasi Pendidikan di Daerah 3T
 - g. Konser Musik dan Anak Muda
5. Pengabdian kepada masyarakat MIP bertema “Meningkatkan Persepsi Masyarakat dan Pengelola BUMDes tentang Pentingnya Kelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan” tahun 2023.
6. Sekretaris Umum Karang Taruna (*Muli Meghanai*) Dusun Umbulioh, Desa Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

**KEBERHASILANKU HARI INI ADALAH WUJUD DARI DO'A IBU DAN
BAPAKKU DI HARI KEMARIN**

*Ridho Allah ada pada Ridho kedua Orang tua dan kemurkaan Allah ada pada
kemurkaan kedua Orang tua*

{HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah)
dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*

{QS. Al-Baqarah 153}

*Focus on “Small Wins” That Deepen Trust, Commitment, and Shared
Understanding*

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan tesis ini kepada:

Kedua Orang tuaku tercinta Emak dan Bapak yang telah memberikan cinta, kasih dan sayang, Do'a, dukungan dan segala hal yang terbaik.

Emak dan Bapak yang selalu mampu menghadirkan suatu yang tidak ada menjadi ada.

Emak dan Bapak yang selalu menjadi Support System terbaikku dan selalu berusaha memberikan apapun yang ada untuk putrimu.

Emak.. Bapak..

Izinkan karya ini putrimu persembahkan kepada kalian, semoga menjadi salah satu wujud baktiku untuk memperoleh ridho Emak dan Bapak sehingga Allah SWT. ridho denganku.

Tiada hal yang lebih baik yang akan kuberikan melainkan segala sesuatu yang Emak dan Bapak ridho'i. Apapun itu..

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Serta

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah atas berkah rahmat dan ridho-Nya penulis telah menyelesaikan naskah tesis dengan judul **“MANAJEMEN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DALAM PELESTARIAN BUDAYA KESENIAN MUSIK GAMBUS LAMPUNG BARAT”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam kepenulisan naskah tesis sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu dalam prosesnya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti di masa mendatang untuk mengembangkan topik serupa dalam objek yang berbeda.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.S., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
5. Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara substansial yang membangun dan bermanfaat dalam penyusunan tesis.

6. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si., sebagai Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara kepenulisan dan substansial yang bermanfaat dalam penyusunan tesis.
7. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si. sebagai Penguji Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran sebagai wujud penyempurnaan penyusunan tesis.
8. Segenap Dosen Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, UNILA dan Staf Sekretariat. Terkhusus kepada Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si., yang senantiasa melibatkan penulis dalam kegiatan ilmiah penelitian, penulisan dan pengabdian selama aktif dalam perkuliahan serta penulis selalu diberikan ruang terbuka untuk berdiskusi tentang berbagai hal. Keberkahan semoga senantiasa dilimpahkan kepada Bapak. Terima kasih pun penulis sampaikan kepada Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., yang memotivasi, dan menginspirasi penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih kepada Bang Penda dan Mba Vivi selaku staf sekretariat yang selalu membantu berbagai hal administrasi dan lainnya selama proses menyelesaikan studi.
9. Kedua orang tua tercinta Ayahanda **Ahmad Mauluddin** dan Ibunda **Kurniya Wati** yang telah memberikan seluruh kasih dan sayang, cinta, do'a, dorongan, motivasi, *support* materiil dan non-materiil dan segalanya dalam hidup penulis dan dalam proses pendidikan hingga sampai dititik ini.
10. Seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi terkait topik penelitian secara komprehensif. Bapak Endang Guntoro selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, Bapak Riady Andrianto selaku Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, Bapak Ahmadi selaku Budayawan/Pemerhati Budaya dan Sekretaris Dewan Kesenian Lampung Barat, Bapak Indra Saputra selaku Ketua Sanggar Orkes Gambus Andan Muakhi, serta Bapak Ahmad Subhan selaku Ketua Sanggar Orkes Gambus Bajarmasin.
11. Segenap rekan di Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 22 tanpa terkecuali, terkhusus konsentrasi manajemen pemerintahan (Bang Herwin, Bang

Sukmi, Bang Amat, Amanda, Kak Roida, Kak Putri, Mba Prilia, Mba Dinda, dan Mba Frida) yang telah bersama-sama selama aktif perkuliahan.

12. Rekan-rekan pejuang tesis Atu Resty, Pakwo Amir, Ito Etro, Pakcik Hendra, Kak Marsha Dita, Amanda, Bang Amat, Haridotama yang telah berjuang bersama sebagai penghuni ruang tunggu mahasiswa, terima kasih atas canda, tawa, petuah dan kebersamaannya serta semoga keberuntungan-Nya senantiasa berpihak kepada kita.
13. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses menyelesaikan pendidikan Magister tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena keterbatasan penulis.
14. Sahabat terbaik Deasy, Rani Dea, Melda, Else, Siti A., Intan Kumala yang menyertai perjalanan studi magister penulis dalam keadaan suka dan duka. Semoga segala hal baik menyertai kita dan hubungan pertemanan ini.
15. Mimi, dan Miki kucingku yang sudah menjaga *mental health*-ku dengan kelucuan kalian. *Sehat-sehat kucingku*
16. Kepada Nadia Khumairatun Nisa terima kasih telah sampai di titik ini atas prosesmu yang panjang itu. Setiap langkah adalah awalan, senantiasa iringi dengan syukur, sabar dan sholat. Dari dan untukku 'Perempuan Hebat'.

Semoga Allah SWT. memberikan keberkahan dan keridhoan atas apa yang kita usahakan, dan Rasulullah Muhammad SAW. mengakui kita sebagai umatnya (kelak), Aamiin.

Bandar Lampung, 11 Juni 2024

Nadia Khumairatun Nisa

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Secara Teoritis.....	12
1.4.2 Secara Praktis	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Konsep <i>Governance</i>	13
2.2 Konsep <i>Management Collaborative Governance</i>	15
2.3 Konsep Pelestarian Budaya	25
2.4 Konsep Kesenian Musik Orkes Gambus.....	27
2.5 Kerangka Pikir.....	34
III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Tipe Penelitian.....	37
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Fokus Penelitian	37
3.4 Penentuan Informan	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40

3.6	Teknik Analisis Data	41
IV.	GAMBARAN UMUM	43
4.1	Kabupaten Lampung Barat.....	43
4.2	Kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	46
4.3	Kelembagaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	48
4.4	Sanggar Orkes Gambus Lampung Barat	49
4.5.1	Sanggar Orkes Gambus Banjarmasin	50
4.5.2	Sanggar Orkes Gambus Andan Muakhi	51
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	53
5.1	Eksistensi dan Pelestarian Budaya Kesenian Musik Gambus Lampung Barat	53
5.2	Manajemen Pemerintahan Kolaboratif dalam Pelestarian Budaya Kesenian Musik Gambus Lampung Barat	61
5.3	Masalah Manajemen Pemerintahan Kolaboratif dalam Pelestarian Budaya Kesenian Musik Gambus Lampung Barat	108
5.4	Model Manajemen Pemerintahan Kolaboratif dalam Pelestarian Budaya Kesenian Musik Gambus Lampung Barat	112
VI.	SIMPULAN DAN SARAN.....	121
6.1	Simpulan.....	121
6.2	Saran.....	123
	DAFTAR PUSTAKA	125

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sanggar dan Grup Orkes Gambus Kabupaten Lampung Barat	6
2. Aktor Kolaborasi	23
3. Karakteristik Gambus Arab, Gambus Melayu, dan Gambus Lampung Barat	31
4. Identitas Informan.....	39
5. Komposisi Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023	45
6. Keikutsertaan Grup Orkes Gambus Pada Festival Sekala Brak Tahun 2018- 2023	100
7. Kerangka Manajemen Pemerintahan Kolaboratif atau <i>Collaborative Governance</i> dalam Pelestarian Budaya Kesenian Musik Gambus Lampung Barat.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Konsep <i>Collaborative Governance</i>	17
2. Gambus Arab	29
3. Gambus Melayu.....	29
4. Gambus	32
5. Kendang Ketipung	32
6. Piul/Biola	33
7. Tamborin.....	33
8. Bas Elektrik	34
9. Kerangka Pikir	36
10. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Barat	44
11. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	47
12. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat	48
13. Peta Persebaran Sanggar Orkes Gambus Lampung Barat per Kecamatan ...	50
14. Struktur Organisasi Sanggar Banjarmasin Padang Cahya	51
15. Pentas Budaya Sanggar Orkes Gambus Andan Muakhi.....	52
16. Agenda Kebudayaan dalam Festival Sekala Brak ke-4 Tahun 2017	55
17. Pemasaran Produk Kebudayaan	73
18. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	88
19. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.....	89
20. Dana Hibah Kebudayaan (Sanggar Seni) Kabupaten Lampung Barat TA 2022	94
21. Festival Sekala Brak pada Karisma Event Nusantara 2023	98
22. Sanggar Andan Muakhi Pada Festival Sekala Brak 7 Tahun 2021	99
23. Sanggar Andan Muakhi Pada Festival Sekala Brak 8 Tahun 2022	100
24. Skema Manajemen Pemerintahan Kolaboratif dalam Pelestarian Budaya Kesenian Musik Gambus Lampung Barat	113
25. Manajemen Pemerintahan Kolaboratif dalam Pelestarian Budaya Kesenian Musik Gambus Lampung Barat	116

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelestarian budaya merupakan upaya mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah membudaya di masyarakat secara berkelanjutan sebagai perwujudan sikap menghargai warisan leluhur. Tujuan pelestarian budaya tersebut adalah revitalisasi atau penguatan kebudayaan yang dapat dilakukan dengan penyadaran dan perencanaan secara kolektif, dan pembangkitan kreatifitas kebudayaan (Hajriana, 2022:6). Pemerintah sebagai aktor kunci memiliki peranan penting untuk menjalankan fungsi dalam pelestarian budaya. Pelestarian budaya oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam fungsi pemberdayaan (*empowerment*). Sebagaimana dikemukakan Taliziduhu Ndraha dalam D. C. Sari dkk., (2020:18) Pemerintahan terdiri dari fungsi pelayanan (*service*), fungsi pemberdayaan (*empowerment*), fungsi pembangunan (*development*).

1. Fungsi pelayanan (*service*) pada pemerintah untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antar masyarakat tersebut.
2. Fungsi pemberdayaan (*empowerment*) yaitu pemberian hak dan kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta menentukan masa depannya. Dengan kata lain, pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas yang memungkinkan terciptanya integrasi nasional.
3. Fungsi pembangunan (*development*) adalah fungsi pemerintah yang dijalankan apabila terdapat situasi dan kondisi masyarakat dalam keadaan lemah serta pembangunan akan dikontrol pada saat masyarakat dalam kondisi membaik.

Maka dari itu, upaya pelestarian kebudayaan oleh pemerintah dalam hal ini termasuk ke dalam fungsi pemberdayaan. Dimana fungsi pemberdayaan memungkinkan pemerintah dalam memberikan hak dan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Oleh karena itu fungsi pemerintah ini harus mampu membawa masyarakat kepada keadaan yang lebih baik. Pembahasan tentang pelestarian budaya oleh pemerintah, akan lebih komprehensif apabila diawali dengan narasi tentang kebudayaan dan pelestarian sebagai dasar untuk memahami penelitian ini.

Pada dasarnya kebudayaan merupakan produk interaksi manusia dalam lingkungan sosialnya. Kecenderungan untuk hidup secara bersama (manusia sebagai makhluk sosial) membawa manusia untuk senantiasa berinteraksi dan mengembangkan budaya karena terus-menerus memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan lainnya. E. B. Tyior dalam Kistanto, (2017:4) mendefinisikan kebudayaan sebagai kesatuan yang terdiri atas pengetahuan, moral, kepercayaan, hukum, adat istiadat, dan kesenian. Koentjaraningrat, (1985:180) juga mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu keseluruhan gagasan, tindakan, dan karya manusia yang menjadi milik manusia yang diperoleh dengan proses pembelajaran dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, dapat dikatakan bahwa kebudayaan sebagai hasil proses pembelajaran manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan secara kolektif.

Koentjaraningrat, (1985:186) membagi kebudayaan dalam tiga wujud yaitu:

1. Sistem budaya sebagai wujud kebudayaan yang paling ideal dan abstrak, oleh karenanya tidak dapat disentuh dan didokumentasikan. Kebudayaan tersebut berwujud gagasan, ide, peraturan, nilai, dan norma (falsafah hidup masyarakat).
2. Sistem sosial sebagai kebudayaan berwujud tindakan berpola yang dilakukan manusia. Pada sistem sosial ini kebudayaan dapat didokumentasikan dan diobservasi sebab tidak berwujud abstrak.

3. Budaya fisik sebagai kebudayaan bersifat konkrit berupa benda-benda yang dapat dilihat dan disentuh sebab hasil dari aktivitas dan karya manusia.

Wujud kebudayaan tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan hingga manusia menghasilkan suatu karya berwujud fisik (budaya fisik). Lebih lanjut, kebudayaan juga terbagi atas dua jenis yaitu budaya benda (*tangible*) dan tak benda (*intangible*). Budaya benda merupakan benda hasil karya manusia yang dapat dilihat seperti cagar budaya, sementara budaya tak benda terdiri atas 5 kategori yaitu tradisi lisan, adat istiadat, keterampilan dan kerajinan, pengetahuan, dan seni pertunjukan. Lima kategori tersebut merupakan budaya abstrak yang dapat ditangkap oleh panca indera selain berwujud benda (Pratama et al., 2020:178).

Seni pertunjukan musik sebagai bagian dari budaya tak benda yang berkembang di masyarakat setidaknya terdiri atas dua jenis yaitu musik klasik dan populer. Musik klasik merupakan seni pertunjukan musik yang mulai berkembang sekitar tahun 1700-an yang identik dengan permainan musik orkestra oleh sepasukan musisi, sementara musik populer yang mulai berkembang di abad 20-an lebih diidentikkan pada penerapan kaidah musikal untuk sekedar hiburan dan lebih mengeksplor kehidupan sehari-hari (Amrizal, 2014:1). Menariknya, terdapat salah satu jenis seni pertunjukan musik yang menggabungkan antara musik klasik dan populer yaitu kesenian musik orkes gambus.

Orkes gambus merupakan seni pertunjukan musik berbentuk ansambel terdiri atas beberapa musisi yang memainkan alat musik gambus dan dilengkapi viol (biola), gendang, dan tamborin (Permana & Hernanda, 2021:2). Orkes gambus juga dikenal sebagai musik yang terikat dengan nuansa ajaran keagamaan dimana isi dan syairnya mengandung perintah ajaran kebaikan (musik bernuansa islami). Di Indonesia, kesenian musik orkes gambus telah ada sejak abad ke-19 yang diyakini datang bersama dengan para imigran Arab dari Yaman Selatan dan Hadramaut sebagai

sarana dakwah dalam bentuk seni pertunjukan (Gani dkk., 2019:68). Seiring berjalannya waktu, tahun 1900-an terjadi dekulturasi kesenian musik orkes gambus dan menjadi cikal bakal musik melayu hingga mencapai puncak eksistensinya. Sejak saat itu, orkes gambus menjadi sajian wajib dalam pesta perkawinan dan khitanan pada masyarakat Indonesia.

Pada puncak eksistensinya, orkes gambus terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia seperti di Sumatera dan Jawa salah satunya di daerah Lampung. Seni pertunjukan musik ini pertama kali hadir di Lampung tepatnya di Lampung Barat pada tahun 1972 yang dibawa oleh Juntawi. Juntawi merupakan seorang seniman yang pertama kali mempelajari seni musik orkes gambus kepada Arifin musisi kenamaan Kota Agung (Maheswara, 2021:69). Puncak eksistensi orkes gambus di Lampung Barat pada tahun 1970 hingga tahun 2000 dengan jenis musik yang berkembang tidak lagi bernuansa islami tetapi telah bernuansa melayu atau dangdut (Prayoga dkk., 2022:258).

Kesenian musik orkes gambus tidak hanya sekadar seni pertunjukan semata, tetapi juga memiliki urgensi bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana tujuan awal penggunaan kesenian ini sebagai sarana dakwah di Nusantara dengan lirik dan syair khas keagamaan (islami) (Gani dkk., 2019:68), kemudian mulai berkembang menjadi bagian dari hiburan masyarakat sebab telah terdekulturasi dengan budaya setempat. Saat ini kesenian musik orkes gambus di Lampung Barat justru telah sepenuhnya menjadi bagian dari musik daerah sebagai hiburan dan ajang silaturahmi masyarakat (Meriwijaya & Luth, 2021:81). Hal ini juga diungkapkan Nisa, (2023:9) dalam opini di harian momentum bahwa orkes gambus Lampung pada prosesnya mampu melibatkan pelaku dan penikmat orkes sekaligus sehingga sangat digemari masyarakat dan sebagai bagian dari kebudayaan daerah yang tidak hanya hiburan, lebih dari itu sebagai wadah silaturahmi masyarakat guna mempererat interaksi sosial. Maka dari itu, eksistensi orkes gambus Lampung sangat penting bagi semua kalangan masyarakat dan sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah.

Permasalahan yang muncul kemudian pasca tahun 2000 kesenian musik orkes gambus Lampung di Kabupaten Lampung Barat mulai mengalami kemunduran selama dua dekade. Meriwijaya & Luth, (2021:81) mengemukakan bahwa kemunduran tersebut terjadi akibat perkembangan zaman dan menguatnya arus globalisasi yang menimbulkan pola kehidupan masyarakat yang lebih modern sehingga masyarakat cenderung memilih kebudayaan baru akibatnya terjadi perubahan atas perhatian, kesadaran, dan minat masyarakat dan generasi muda terhadap kesenian musik orkes gambus Lampung. Kemunduran eksistensi tersebut dapat dilihat dari vakumnya aktivitas grup orkes gambus Dian Utama Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit pada kurun waktu tahun 1990-2017. Grup orkes gambus ini juga sebagai salah satu sanggar dan grup musik senior di Kabupaten Lampung Barat yang berdiri pada tahun 1980 (Maheswara, 2021:69).

Peran pemerintah adalah faktor utama yang mempengaruhi kemunduran eksistensi kesenian musik gambus Lampung Barat. Ketiadaan inisiasi pemerintah dalam memaksimalkan peranan untuk menghadirkan kegiatan pelestarian budaya serta tidak ada wadah forum bagi aktor non-pemerintah untuk saling berkolaborasi merupakan permasalahan mendasar pada kemunduran eksistensi kesenian musik orkes gambus Lampung Barat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Meriwijaya & Luth, (2021:81) bahwa aktivitas kesenian musik orkes gambus Lampung Barat baru kembali hadir pada tahun 2018 sebagai bagian dari inisiatif pemerintah. Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat juga pada tahun 2019 baru memunculkan inovasi pentas seni orkes gambus yang dilaksanakan secara rutin dan wujud kegiatan pelestarian ini tidak pernah diadakan sebelumnya (KejarFakta.co, 2019).

Pasca dua dekade hilangnya aktivitas kesenian musik orkes gambus Lampung di kalangan masyarakat, pada tahun 2018 seni musik ini kembali bangkit secara drastis di Kabupaten Lampung Barat. Peran pemerintah kembali hadir ditandai dengan kegiatan festival kebudayaan “Karisma Event

Nusantara Festival Budaya Sekala Bekhak” yang mengusung kesenian musik gambus Lampung (Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2022). Dorongan pemerintah melalui kebijakan tersebut turut membawa peningkatan perhatian, kesadaran dan minat masyarakat untuk mengaktifkan kembali aktivasi kesenian musik orkes gambus Lampung di setiap pekon/desa. Hal ini dibuktikan dengan lebih dari 40 sanggar dan grup orkes gambus Lampung lama dan pendatang baru (Meriwijaya & Luth, 2021:87). Menariknya fenomena kemunduran dan kebangkitan seni musik ini hanya terjadi di Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 1. Sanggar dan Grup Orkes Gambus Kabupaten Lampung Barat

NO	Nama Sanggar dan Grup Orkes	Asal	Kecamatan
1	Sanggar Banjarmasin	Padang Cahya	Balik Bukit
2	Andan Mufakat	Gunung Sugih Liwa	Balik Bukit
3	OG Diwangga	Way Mengaku	Balik Bukit
4	Andan Muakhi Umbulioh	Sebarus	Balik Bukit
5	Angon Saka	Pekon Watas	Balik Bukit
6	Ratai Grup	Sukarami	Balik Bukit
7	OG Sailiwa Grup	Liwa	Balik Bukit
8	OG Sang Muakhi Bahway	Bahway	Balik Bukit
9	Andan Jejama	Kota Agung Liwa	Balik Bukit
10	Sanggar Sebarus Sai	Sebarus	Balik Bukit
11	OG Radeka	Kesugihan Baru	Balik Bukit
12	Mutiara Grup	Kurungan Aji	Balik Bukit
13	OG Sinar Pesagi	Bahway	Balik Bukit
14	Rapi Lokal II	Lampung Barat	Balik Bukit
15	Janji Muakhi	Bahway	Balik Bukit
16	Andan Jejama Titi Jelatong	Watas	Balik Bukit

17	Gema Musik Tembelang	Banjar Negeri Suoh	Banjar Negeri Suoh
18	Sumbay Sukajaya	Kerang	Batu Brak
19	Andan Saka	Suka Raja	Batu Brak
20	OG Semulli	Pekon Balak	Batu Brak
21	Andan Jejama	Gunung Sugih	Batu Brak
22	Salui Pitu	Pekon Balak	Batu Brak
23	Sanggar Buai belajan Diwai	Batu Brak	Batu Brak
24	Teba Liokh	Teba Liokh	Batu Brak
25	HRK Cunggu	Cunggu	Batu Brak
26	Sanggar Jejama	Pekon Awi	Batu Brak
27	OG Way Bapitu	Bakhu	Batu Ketulis
28	Gemuttukh Agung	Bakhu	Batu Ketulis
29	OG Seandanan	Way Ngison	Batu Ketulis
30	Sanggar Way Ghemelai	Pekon Turgak	Belalau
31	OG Bakhnasi Punyimbang Bawang	Pajar Agung	Belalau
32	Limbang	Bedudu	Belalau
33	Angkon Jejama	Turgak	Belalau
34	Buay Benyata Grup	Pekon Luas	Belalau
35	Kilu Andan	Penengahan Turgak	Belalau
36	Sanggar Luppak Way	Pekon Bumi Agung	Belalau
37	Andan Muakhi Grup	Kenali	Belalau
38	OG Kilu Bimbing	Pekon Serungkuk	Belalau
39	OG Pelimpuhan	Kebun Tebu	Kebun Tebu
40	Himpun Muakhi	Pura Mekar	Kebun Tebu
41	OG Seakkonan	Sekincau	Sekincau
42	Bunguyan Bang Ucung	Bunguyan	-

Sumber: Meriwijaya & Luth, (2021:87)

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti mengidentifikasi bahwa peran pemerintah menjadi faktor utama kebangkitan kesenian musik gambus Lampung di Kabupaten Lampung Barat. Peran tersebut tentu dijalankan tidak hanya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, tetapi juga melibatkan berbagai pihak guna mencapai keberhasilan pelestarian budaya daerah. Perkembangan aktivitas kebudayaan yang meningkat dan terstruktur setiap tahunnya dan peran pemerintah dalam membangun kolaborasi hingga mampu membalikkan tren budaya menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Oleh karena itu asumsinya adalah keberhasilan pelestarian budaya daerah akan terwujud apabila terdapat manajemen kolaboratif dalam pemerintahan.

Konsep manajemen kolaboratif telah banyak digunakan untuk menggambarkan pola hubungan kerja oleh lebih dari satu orang. Menurut Situngkir dkk., (2020:163) manajemen kolaboratif merupakan suatu konsep pengelolaan dengan didasarkan pada pengembangan secara transparan, terdapat kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan yang menjelaskan peran, hak dan kewajiban dalam proses kolaborasi. Kesepakatan bersama setidaknya memuat jenis kegiatan dan jangka waktu, penetapan dan pengakuan peran, hak dan kewajiban pemangku kepentingan, prosedur pengambilan keputusan dan manajemen konflik, prosedur penegakan kesepakatan, rencana pengelolaan kolaboratif, serta ketersediaan anggaran secara teratur.

Secara umum, manajemen kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan serangkaian aktivitas lembaga publik yang melibatkan pemangku kepentingan *non-state* dalam proses implementasi kebijakan (Hakim, 2022:119). Karakteristik utama manajemen kolaboratif adalah insiasi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam memberikan wadah forum bagi aktor non-pemerintah (Sulaeman dkk., 2022:6680). Dewasa ini, konsep tersebut sangat dibutuhkan dalam sektor publik yang memungkinkan aktor kolaborasi dapat berada pada satu forum dalam membangun kesepakatan dan komitmen serta bertanggung jawab atas kesepakatan

bersama. Oleh karena itu, implementasi manajemen kolaboratif merupakan suatu pilihan strategis dari lembaga publik dalam mencapai tujuan tertentu.

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya daerah adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Afandi et al., (2021) tentang *Collaborative Governance* pelestarian budaya Melayu Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pelestarian budaya Melayu Riau tidak terlaksana hal ini karena Pemda Riau tidak memiliki komitmen dalam mencapai visinya yang tercermin dalam kebijakan pemerintah. Kurangnya peta jalan untuk visi budaya sehingga struktur jaringan antara pemangku kepentingan tidak terbentuk, tidak terintegrasinya rencana induk yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan, tidak memiliki ukuran baku yang menggambarkan prosedur dan kewenangan dalam tindakan, tidak ada fungsi pengambilan keputusan bersama dan pembagian tanggung jawab serta tidak ada komunikasi dan arus informasi antar pemangku kepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hakim, (2022) tentang kolaborasi pemerintah daerah dalam pelestarian tradisi lisan Iko-iko suku Bajau di Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dengan swasta (PT. Antam Tbk) dan terdapat kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat/LSM (MediaQita Foundation) dalam pelestarian tradisi lisan *Iko-iko* suku Bajau di Sulawesi Tenggara. Kehadiran kurikulum berbasis budaya di tiga sekolah dasar wilayah pesisir Desa Hakatotubu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi percontohan bagi sekolah lain dengan mempelajari bahasa lokal, ekspresi budaya dan seni tradisi lisan *Iko-iko* masyarakat Bajau menjadi langkah awal dalam mempelajari, melestarikan, dan mempertahankan kekayaan suku Bajau agar senantiasa eksis di tengah perkembangan zaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk., (2020) tentang kolaborasi kreatif kegiatan pariwisata dan pelestarian budaya di Taman Budaya Yogyakarta

(TBY). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi kreatif muncul dari aspek nilai-nilai, bentuk, manajemen, dan peran pemangku kepentingan kegiatan. Kolaborasi kreatif terbentuk karena didukung oleh komunitas sebagai aktor penggerak dominan penyelenggaraan acara di TBY. Pemerintah dan pengelola berperan dalam mengatur pergerakan kegiatan melalui kebijakan dan peraturan. Lebih lanjut, terwujudnya kolaborasi juga dipengaruhi oleh motivasi dan persepsi masyarakat terhadap budaya yang berkembang seiring pesatnya informasi.

Penelitian yang dilakukan Setiawan, (2013) tentang Strategi kolaborasi dalam seni pertunjukan tradisional di Kabupaten Subang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kolaborasi yang dilakukan meliputi kolaborasi lintas waktu dan lintas ruang yang masih dibatasi oleh seperangkat aturan agar kolaborasi tidak melenceng dari identitas ketradisionalannya.

Penelitian yang dilakukan lo, (2019) tentang kolaborasi antara praktisi dan lembaga publik dalam melestarikan dan mempromisikan warisan musik di Macao. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melestarikan dan mempromosikan warisan musik di Macao telah dikembangkan sebuah kerangka untuk menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dan para pemain bersama-sama melestarikan Opera Kanton. Kerangka tersebut juga menyarankan pendekatan untuk menyeimbangkan hubungan kekuasaan antara pemain kunci dengan cara mengungkapkan pertukaran peran pemerintah daerah dan para pelaku. Lebih dari itu, kunci kolaborasi yang efektif adalah komunikasi dan koordinasi atas tujuan bersama.

Berdasarkan temuan dari penelitian terdahulu mengenai pelestarian budaya yang telah disebutkan, terlihat bahwa belum ada penelitian yang memfokuskan pada pelestarian budaya dalam konteks kesenian musik gambus dengan pendekatan manajemen pemerintahan kolaboratif. Penelitian ini mengacu pada konsep manajemen pemerintahan kolaboratif yang menyangkut bagaimana pemerintah mengelola kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian budaya, sesuai dengan

prinsip-prinsip *collaborative governance*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Manajemen Pemerintahan Kolaboratif dalam Pelestarian Budaya Kesenian Musik Gambus Lampung Barat yang belum pernah dikaji pada penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kesenian musik orkes gambus Lampung Barat merupakan salah satu warisan budaya daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga solidaritas sosial masyarakat. Oleh karena itu, untuk tetap eksis perlu dilakukan pelestarian budaya khususnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan menjalin kolaborasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan. Atas dasar tersebut, peneliti membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat dilihat dari aspek konteks sistem, *drivers* (pendorong), dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi kolaborasi?
2. Bagaimana masalah manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengkaji atau menganalisis manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat dilihat dari aspek konteks sistem, *drivers* (pendorong), dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi kolaborasi.
2. Mendeskripsikan masalah manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan memperkaya khasanah pemikiran ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan pelestarian budaya dan tata kelola pemerintahan.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan serta para pembuat kebijakan di daerah Lampung dan kabupaten Lampung Barat khususnya terkait pelestarian budaya dan segala instrumennya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep *Governance*

Governance merupakan sebuah konsep yang banyak digunakan sebagai sebuah padanan pada istilah “administrasi publik”. Secara umum *governance* dipahami sebagai peralihan penyelenggaraan kebijakan publik yang tidak lagi berpusat pada pemerintah, tetapi terdapat keterlibatan aktor lain yang berpartisipasi secara baik terdiri atas masyarakat, privat dan lainnya (Astuti dkk., 2020:32). Dengan kata lain, *governance* menghendaki proses pengambilan keputusan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Tata kelola pemerintahan demikian menjadi tren baru dalam pengelolaan agenda publik yang membuka seluas-luasnya peluang interaksi intensif antar pemangku kepentingan lintas sektoral.

Wacana *governance* ini lahir dari adanya liberalisasi ekonomi di Amerika Serikat dan Inggris yang kemudian terdistribusi dan teradopsi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di dunia sebagai sebuah pendekatan baru (Mukhlis & Mushtofa, 2020:113). Konsep *governance* merupakan pendekatan baru yang berkembang secara beragam sebagai sebuah konsekuensi yang disebabkan oleh faktor globalisasi dan demokratisasi politik. Berangkat dari hal tersebut kemudian berbagai definisi muncul untuk mengeksplisitkan konsep *governance*.

Governance sebagai administrasi publik dimaknai sebagai cakupan yang luas tentang organisasi yang berhubungan satu sama lain dalam melakukan kegiatan publik. Menurut Suyatna, (2009:19) Hubungan yang dibangun berbentuk koordinasi, kolaborasi, dan perluasan kekuasaan yang semua didominasi oleh pemerintah dan didistribusikan kepada aktor di non-pemerintah. Adapun *governance* yang digunakan dalam hal ini merupakan

sebuah sistem manajemen multi organisasi. Lebih lanjut, Rhodes dalam Suyatna, (2009:17) mengemukakan bahwa *governance* memiliki ciri organisasi *networks* sebagai tuntutan yang menghendaki organisasi memiliki efektivitas dan efisiensi berdasarkan pertukaran sumber daya. Berdasarkan definisi konsep diatas dalam disimpulkan bahwa *governance* merupakan simbolisasi sistem pemerintahan dengan nilai-nilai koordinasi, kolaborasi, dan distribusi yang mutualistik dalam menjalankan kegiatan publik.

Menurut Rhodes dalam Abdullah, (2016:67) kriteria organisasi *networks* dalam konsep *governance* diuraikan sebagai berikut.

1. Interdependensi antara organisasi mencakup lingkup yang lebih luas meliputi aktor non-pemerintah (*state*) seperti masyarakat dan sektor privat.
2. Interaksi secara kontinu antar organisasi dalam rangka pertukaran sumber daya dan negosiasi sumber daya.
3. Interaksi terikat dalam kepercayaan dan negosiasi yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi.
4. Tidak ada kewenangan mutlak karena setiap organisasi memiliki derajat hubungan yang sama.

Mukhlis & Mushtofa, (2020:114) mengemukakan bahwa *governance* merupakan pelibatan aktor non-pemerintah dari berbagai level secara konstruktif dan seluas-luasnya serta membatasi intervensi pemerintah terhadap kebijakan publik. Lebih lanjut, terdapat dua landasan dasar yang melatarbelakangi proses tersebut yang dapat dijelaskan baik secara internal maupun eksternal. Pertama, pemerintah secara internal tidak mungkin dapat secara optimal menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan hanya dengan mengandalkan kapasitas internal yang dimiliki. Keterbatasan dalam mengimplementasikan kebijakan publik kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai aktor untuk mencapai tujuan.

Kedua, secara eksternal bahwa perubahan lingkungan kebijakan secara dinamis mampu membentuk isu yang semakin luas, bentuk dan jumlah aktor

yang meningkat, dan responsifitas masyarakat yang semakin luas. Namun demikian, landasan dasar ini tetap memberikan ruang bagi pemerintah sebagai aktor kunci yang relevan dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses kebijakan publik dilakukan melalui forum yang terlembaga, kesepakatan dan aturan bersama, dan menjalankan prinsip kedudukan dan kesempatan yang sama. Dengan kata lain, keterkaitan antar aktor kolaborasi dilakukan dalam prinsip kedudukan dan kesempatan bersama.

2.2 Konsep *Management Collaborative Governance*

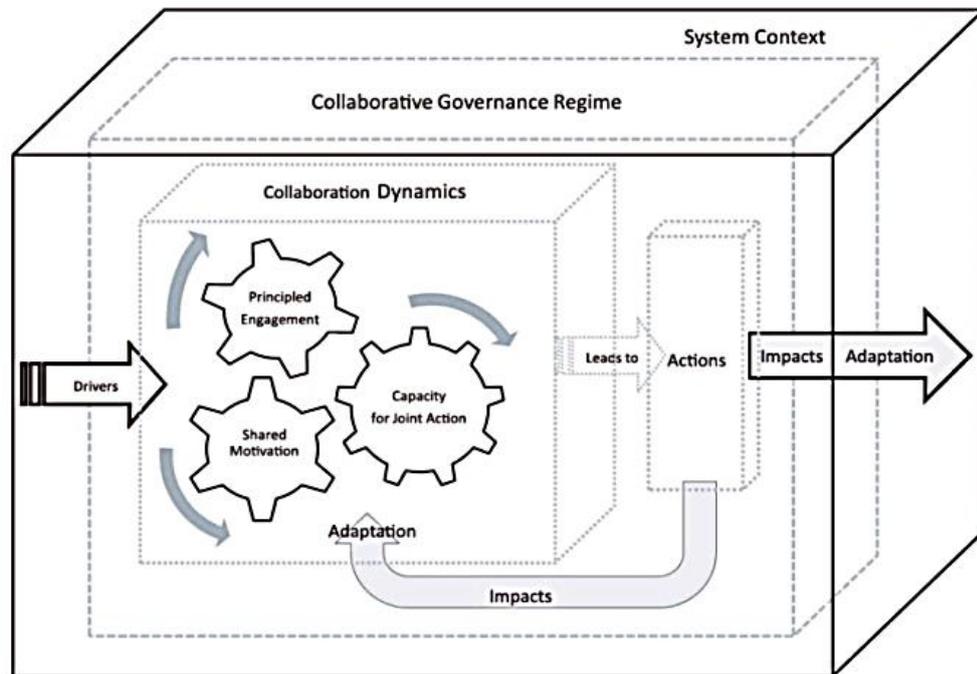
Pada dasarnya studi manajemen pemerintahan hadir sebagai wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu konsep manajemen yang sering diterapkan dalam sistem pemerintahan adalah *collaborative governance*. Konsep ini membawa pada pemahaman terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan yang melibatkan aktor lain dalam pengambilan peran dan keputusan. Adapun konsep *collaborative governance* telah di deskripsikan sebagai berikut.

Menurut Emerson et al., (2012:2) *collaborative governance broadly as the processes and structures of public decision making and management that engage people constructively across the boundries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished.*

Collaborative governance dalam arti luas diartikan sebagai suatu proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau pihak di luar lembaga dalam rangka mencapai tujuan umum dan hanya dapat dicapai dengan cara tersebut. Sebagaimana Astuti dkk., (2020:47) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai suatu cara pengelolaan “suatu hal” yang melibatkan pemangku kepentingan secara langsung dan tidak langsung, berorientasi dan dilaksanakan melalui musyawarah dalam pengambilan keputusan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Schöttle et al., (2014:1271) juga menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan kegiatan yang bersifat otonom, kerjasama dan kolaborasi yang dipengaruhi oleh faktor kesediaan berkompromi, komunikasi, kepercayaan, komitmen, pertukaran informasi dan pengetahuan, serta kesediaan bersama dalam mengambil risiko. Adapun Ansell & Gash, (2008:563) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah konsep pengaturan yang mengatur lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif dengan tujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan atau aset publik. *Collaborative governance* dibagi atas empat komponen yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi (Ansell & Gash, 2008:563).

Berdasarkan definisi konsep *collaborative governance* tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses manajemen pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang diharapkan melalui kolaborasi bersama dengan pemangku kepentingan diluar lembaga pemerintahan. *Collaborative governance* ini telah banyak diimplementasikan oleh lembaga publik karena mampu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat melalui pelibatan secara aktif.



Gambar 1. Konsep *Collaborative Governance*

Sumber: Emerson et al., (2012:6)

Adapun *collaborative governance* setidaknya meliputi beberapa komponen. Sebagaimana yang dikemukakan Emerson et al., (2012:10) komponen tersebut yaitu konteks sistem, *drivers* (pendorong), dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi kolaborasi.

1. Konteks Sistem

Konteks sistem dalam kerangka kerja *collaborative governance* menciptakan peluang dan hambatan serta mempengaruhi parameter umum dalam perkembangannya melalui dampak dari tindakan kolaborasinya. Konteks sistem tidak hanya sebagai rangkaian kondisi awal tetapi juga sebagai ruang tiga dimensi yang melingkupinya karena kondisi eksternal tertentu yang dapat mempengaruhi dinamika kolaborasi selama berlangsungnya proses, sehingga membuka kemungkinan baru seperti tantangan tertentu.

2. *Drivers* (Pendorong)

Pada kerangka kerja *collaborative governance* faktor pendorong disajikan secara terpisah dengan variabel kontekstual, yang mana faktor pendorong tersebut akan mendorong keberhasilan proses kolaborasi. Elemen dalam faktor pendorong ini meliputi kepemimpinan, insentif konsekuensial, saling ketergantungan, dan ketidakpastian.

- a. Kepemimpinan sebagai pendorong utama berada pada posisi untuk memulai dan membantu mengamankan sumber daya dan dukungan kolaborasi. Pemimpin kolaborasi adalah salah satu aktor atau pejabat pembuat keputusan yang berkomitmen dalam menyelesaikan masalah secara kolaboratif.
- b. Insentif konsekuensial mengacu pada faktor pendorong internal atau eksternal tindakan kolaborasi. Wujud insentif konsekuensial dapat berupa ketersediaan dana hibah atau peluang pendanaan yang mengarahkan pada pengembangan insentif kolaborasi untuk mendorong pemimpin dan peserta secara kolektif terlibat.
- c. Saling ketergantungan sebagai prasyarat yang diakui secara luas bahwa tindakan kolaborasi perlu dilakukan karena ketidakmampuan aktor kolaborasi dalam menyelesaikan secara mandiri.
- d. Ketidakpastian sebagai tantangan utama dalam mengelola permasalahan yang mendorong saling ketergantungan sehingga dapat diselesaikan secara kolaboratif.

3. Dinamika Kolaborasi

Bagian paling penting dalam proses kolaborasi adalah dinamika kolaborasi. Dinamika kolaborasi mampu mengemukakan baik atau tidaknya proses kolaborasi yang meliputi indikator penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas tindakan bersama.

Pertama, penggerakan prinsip bersama dilakukan dengan cara dialog tatap-muka dan/atau melalui perantara teknologi. Komponen penggerakan bersama terdiri atas pengungkapan kepentingan, nilai-nilai aktor dan upaya membangun kepentingan bersama; delibrasi; dan determinasi (Astuti dkk., 2020:82). Kedua, motivasi bersama yaitu proses penguatan siklus yang meliputi komponen kepercayaan bersama; pemahaman bersama; legitimasi internal dan komitmen. Ketiga, kapasitas tindakan bersama yaitu berbagai hasil elemen lintas fungsional untuk menghasilkan tindakan efektif dari kapasitas aktor yang memadai. Adapun kapasitas tindakan bersama terdiri atas prosedur dan kesepakatan bersama; kepemimpinan; pengetahuan dan sumberdaya (Astuti dkk., 2020:82).

a. Penggerakan Prinsip Bersama

1. Pengungkapan merupakan komponen penggerakan prinsip bersama mencirikan upaya berkelanjutan untuk membangun dan mengartikulasikan tujuan bersama, menyepakati konsep dan terminologi masalah dan peluang, memperjelas dan menyesuaikan tugas dan harapan, serta menetapkan kriteria bersama guna menilai informasi dan alternatif.
2. Deliberasi terbentuk dalam proses kolaborasi dengan adanya diskusi bersama secara terbuka yang berarti terdapat upaya mendorong untuk mengemukakan pendapat, ketidaksetujuan, dan lainnya. Model kolaboratif ini memberikan ruang “aman” untuk menghadirkan deliberasi atau diskusi bersama dalam mendengarkan pendapat dan menetapkan tujuan bersama.
3. Determinasi merupakan wujud pengambilan keputusan secara prosedural (penetapan agenda, diskusi, dan pembagian tugas) dan/atau secara substansial seperti penetapan tindakan kolaborasi.

b. Motivasi Bersama

1. Kepercayaan bersama sebagai elemen awal yang sangat penting dalam proses motivasi bersama yaitu kepercayaan yang menghasilkan pemahaman bersama, legitimasi, dan komitmen. Faktor terbentuknya kepercayaan bersama adalah hubungan saling ketergantungan, hubungan diluar kolaborasi, pengalaman atau prestasi aktor dan lainnya.
2. Pemahaman bersama merupakan saling pengertian yang secara khusus mengacu pada kemampuan dalam memahami dan menghargai kepentingan orang lain bahkan ketika salah satu pihak tidak sepakat.
3. Legitimasi internal sebagai pengakuan internal kolaborasi berkaitan dengan kredibilitas aktor, serta kepentingan yang selaras dan saling bergantung sehingga melegitimasi dan memotivasi kolaborasi berkelanjutan. Legitimasi internal memungkinkan pemangku kepentingan melintasi batas-batas organisasi, sektoral, maupun yurisdiksi sehingga mengarah pada terciptanya komitmen bersama.
4. Komitmen memungkinkan aktor kolaborasi yang semula terpisahkan oleh perbedaan kepentingan menjadi satu dan berkomitmen pada tujuan bersama. Elemen ini tercipta oleh kualitas kepercayaan bersama, pemahaman bersama, dan legitimasi internal.

c. Kapasitas Tindakan Bersama

1. Pengaturan prosedural dan institusional dalam kolaborasi diperlukan dalam mengelola interaksi berkelanjutan. Pengaturan tersebut meliputi serangkaian protokol proses dan struktur organisasi intra-organisasi dan/atau ekstra-organisasi.
2. Kepemimpinan sebagai pendorong eksternal yang merupakan unsur penting guna mendorong keberhasilan

kolaborasi. Peran pemimpin mencakup sponsor, penyelenggara, fasilitator/mediator, perwakilan organisasi, dan memperjuangkan tekad kolaborasi hingga terimplementasikan.

3. Pengetahuan mengacu pada modal sosial dari pengetahuan bersama yang telah ditimbang, diproses, dan diintegrasikan dengan nilai-nilai dan penilaian bersama. Penguatan proses kolaborasi memungkinkan terjadi apabila pengetahuan semakin terspesialisasi dan terdistribusi bersama dengan infrastruktur kelembagaan yang lebih kompleks dan saling bergantung.
4. Sumberdaya sebagai mata uang dalam proses kolaborasi karena potensial dalam berbagi dan memanfaatkan sumber daya langka. Sumberdaya dapat berupa dukungan anggaran dan sarana/prasarana; bantuan administratif dan organisasi; keterampilan dalam analisis dan implementasi; kekuasaan; dan keahlian.

4. Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi berarti cerminan dinamika kolaborasi yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan diskusi dan/atau event lainnya. Menurut Emerson et al., (2012:17) kualitas tindakan kolaborasi dapat dilihat dari pembangunan dan pemahaman pada proses dinamika kolaborasi. Hasil tindakan kolaborasi akan mengarah secara langsung pada dampak jangka pendek dan jangka panjang.

5. Dampak dan Adaptasi Kolaborasi

Dampak kolaborasi merupakan dampak sementara yang dihasilkan selama proses kolaborasi yang terdiri atas dampak yang diharapkan dan dampak tidak terduga. Dampak kolaborasi akan menghasilkan umpan balik yang diadaptasi dalam proses kolaborasi (Astuti dkk., 2020:86). Sementara adaptasi kolaborasi dilakukan secara langsung

dan tak langsung dikatakan baik apabila tidak adanya pengaruh kepentingan organisasi lain di atas kolaborasi yang berakibat pada terjadinya usaha mengambil manfaat kolaborasi secara lebih untuk kepentingan organisasi sendiri. Adaptasi yang berdasar pada kebutuhan utama yang dikolaborasikan akan menghasilkan kemajuan yang baik terhadap kolaborasi.

Menurut Seka dkk., (2022:101) setidaknya konsep *collaborative governance* terdiri atas pemerintah dan non-pemerintah sebagai aktor kolaborasi. Adapun peran aktor kolaborasi adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah adalah penggerak kolaborasi yang berperan sebagai aktor yang mempersiapkan sarana dan prasarana, pemberi legitimasi atau kewenangan dalam menerbitkan peraturan, dan penyedia sumberdaya yang berkualitas.
2. Non-pemerintah adalah kolaborator yang berperan sebagai aktor pengembang produktivitas dalam hal ini pelestarian budaya, sumber dan penyalur informasi kepada masyarakat luas, dan pengembang legitimasi atau kebijakan dari pemerintah. Aktor non-pemerintah dalam proses kolaborasi terdiri atas komunitas dan masyarakat.

Pada Penelitian ini pelestarian budaya orkes gambus Lampung Barat setidaknya melibatkan aktor kolaborasi pemerintah yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, serta aktor non-pemerintah yaitu Sanggar Orkes Gambus Lampung Barat dan Budayawan/Pemerhati Budaya kesenian musik gambus Lampung Barat. Adapun peran aktor kolaborasi adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Aktor Kolaborasi

No.	Aktor	Jenis Lembaga	Peran
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat	Pemerintah	Penggerak Kolaborasi
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	Pemerintah	Penggerak Kolaborasi
3	Sanggar Orkes Gambus Lampung Barat	Non-pemerintah	Kolaborator
4	Budayawan/Pemerhati Kesenian Musik Gambus Lampung Barat	Non-pemerintah	Kolaborator

Sumber: Diolah Peneliti, (2023)

Collaborative governance pada implementasinya tentu dihadapkan dengan sejumlah tantangan atau permasalahan. Menurut Huxham et al., (2000:341) tantangan atau permasalahan tersebut terdiri atas kompleksitas struktural dan keragaman (*Diversity*) dengan dimensi masing-masing. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

1. Kompleksitas Struktural

- a. Hubungan kerja merupakan salah satu dimensi kompleksitas struktural dalam kolaborasi. Pada praktiknya hubungan kerja dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dengan cara yang berbeda dan intensitas yang berbeda pula. Permasalahannya adalah kerap kali perbedaan intensitas hubungan kerja mempengaruhi pendelegasian tanggung jawab pada aktor kolaborasi. Dengan kata lain, terdapat kecenderungan mendelegasikan tanggung jawab kepada aktor dengan intensitas hubungan kerja yang lebih intim.
- b. Pluralisme merupakan ekspansi besar-besaran dalam membangun kolaborasi sebagai akibat dari kesadaran bahwa permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan melalui inisiatif multi-aktor. Implikasinya adalah pluralisme kolaborasi yang terjadi justru mengabaikan rencana utama kolaborasi sebab aktor

yang terlibat kerap kali lebih merespon pada insentif pemerintah dibandingkan mempertahankan inisiatif kolaborasi.

- c. Struktur Tata Kelola dan Tugas jarang diwujudkan hanya melalui pertemuan rutin komite manajemen. Seringkali, struktur tata kelola dan tugas terdiri atas beberapa lapisan yang muncul dari kenyataan praktis dan tugas yang ditangani meskipun telah ada desain struktur diawal.
- d. Keanggotaan Organisasi dalam dimensi kompleksitas struktural berkaitan dengan perbedaan derajat dari anggota kolaborasi yang berakibat pada tingkat keterlibatan anggota kolaborasi. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan hubungan interpersonal, kekuatan dan peranan, serta tujuan organisasi dalam kolaborasi.
- e. Ambiguitas dalam kompleksitas struktural berhubungan dengan ketidakjelasan anggota kolaborasi, siapa mewakili apa, hubungan kerja, serta status dan peran dalam kolaborasi.
- f. Dinamika dalam kompleksitas struktural berkaitan dengan perubahan yang terus menerus. Pemerintah cenderung mendorong inisiatif dan tujuan baru terlebih ketika tujuan awal telah dicapai. Dengan kata lain, kontinuitas inisiatif dan tujuan tidak terjadi, hal ini mempengaruhi sifat aktor kolaborasi (hilangnya organisasi inti, dan perubahan aktor kolaborasi).

2. Keragaman (*Diversity*)

- a. Sumberdaya dan Tujuan pada dasarnya menghasilkan potensi keberhasilan kolaborasi. Namun perbedaan sumberdaya juga dapat menjadi penyebab perbedaan tujuan organisasi. Tantangan yang dihasilkan perbedaan tersebut adalah seringkali masing-masing sumberdaya dengan tujuan yang berbeda kurang bersedia berkomitmen pada tujuan kolaborasi.

- b. Bahasa dan budaya kerap kali menjadi tantangan dalam kolaborasi. Terdapat beberapa perbedaan stereotipe yang jelas antara aktor kolaborasi dalam hal bahasa dan budaya masing-masing organisasi. Perbedaan bahasa dan budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman signifikan di antara aktor kolaborasi misalnya perbedaan antara bahasa pemerintah dengan bahasa masyarakat.
- c. Kekuasaan, biasanya terdapat perbedaan kekuasaan yang nyata diantara organisasi kolaborasi. Masalah perbedaan kekuasaan dapat meluas melampaui tingkat organisasi dan individu aktor dalam kolaborasi. Kapasitas kekuasaan yang sama antar aktor menjadi kunci keberhasilan kolaborasi, namun hal ini menjadi sulit dicapai apabila organisasi yang terlibat lebih dari enam individu dan/atau tujuan kolaborasi lebih mementingkan salah satu pihak.

2.3 Konsep Pelestarian Budaya

Pada dasarnya dalam memahami konsep pelestarian budaya terlebih dahulu diawali dengan mengetahui konsep kebudayaan itu sendiri sebagai objek yang dilestarikan. Kebudayaan menurut Koentjaraningrat, (1985:180) didefinisikan sebagai suatu nilai hasil karya manusia yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperoleh melalui serangkaian proses pembelajaran. Kebudayaan dalam hal ini diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

1. Sistem budaya yang memiliki wujud sangat abstrak dan ideal karena tidak dapat disentuh dan diraba serta tidak dapat didokumentasikan. Adapun sistem budaya terdiri atas ide, gagasan, nilai, norma, dan pedoman hidup masyarakat.
2. Sistem sosial yang memiliki wujud berupa tindakan berpola yang dapat diobservasi dan didokumentasi.

3. Budaya fisik berwujud konkrit sehingga dapat disentuh dan dilihat yang merupakan hasil dari aktivitas dan karya manusia.

Menurut Koentjaraningrat dalam Nisa, (2022:23) unsur-unsur kebudayaan yang terkandung didalam tiga wujud kebudayaan diatas adalah sebagai berikut.

1. Sistem ekonomi dan sistem mata pencaharian
2. Sistem kemasyarakatan
3. Sistem pengetahuan
4. Sistem religi
5. Bahasa lisan dan tulisan
6. Peralatan dan perlengkapan kehidupan sehari-hari
7. Kesenian

Kesenian musik gambus dalam hal ini termasuk ke dalam unsur kesenian yang berwujud budaya fisik karena bersifat konkrit dan hasil dari aktivitas manusia di masyarakat. Setiap komunitas masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda dan menjadi ciri khas yang membedakan antar masyarakat. Kebudayaan tersebut harus terus dilestarikan baik oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh pemerintah. Beberapa definisi konsep pelestarian budaya menurut para ahli sebagai berikut.

Pelestarian budaya berarti upaya mempertahankan nilai tradisional dan nilai seni budaya masyarakat dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, selektif dan luwes, serta senantiasa menyesuaikan perubahan situasi dan kondisi ditempat berkembangnya budaya tersebut (Kurnianto dkk., 2019:63). Pelestarian budaya didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan terstruktur dalam rangka mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan sesuatu yang tetap dan abadi. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam pelestarian budaya yaitu *culture experience* yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam pengalaman kultural; *culture knowledge* yang dilakukan dengan membuat

suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasikan menjadi berbagai wujud (Nahak, 2019:172).

Pada dasarnya pelestarian budaya merupakan sebuah sistem besar yang melibatkan berbagai pihak untuk masuk ke dalam sebuah subsistem yang saling terhubung (Priatna, 2017:39). Oleh karena itu, upaya pelestarian budaya bukan aktivitas individual dan mandiri, akan tetapi menjadi otoritas bersama dan terorganisir. Pelestarian budaya merupakan perwujudan sikap untuk senantiasa mempertahankan akar tradisi yang mapan dan nilai-nilai terdahulu meliputi ajaran dan budaya leluhur sebagai wujud kenangan (Anggraeni dkk., 2022:3). Dengan kata lain, pelestarian budaya merupakan implementasi sikap menghargai warisan budaya dengan mempertahankan akar tradisinya.

Berdasarkan beberapa definisi konsep pelestarian budaya tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelestarian budaya sebagai implementasi upaya mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah membudaya di masyarakat secara berkelanjutan sebagai perwujudan sikap menghargai warisan leluhur dan hanya dapat dilakukan secara kolektif oleh seluruh pemangku kepentingan. Adapun implementasi sikap tersebut dilakukan melalui pengalaman kultural dan pengalaman pemahaman yang bernilai fungsional.

2.4 Konsep Kesenian Musik Orkes Gambus

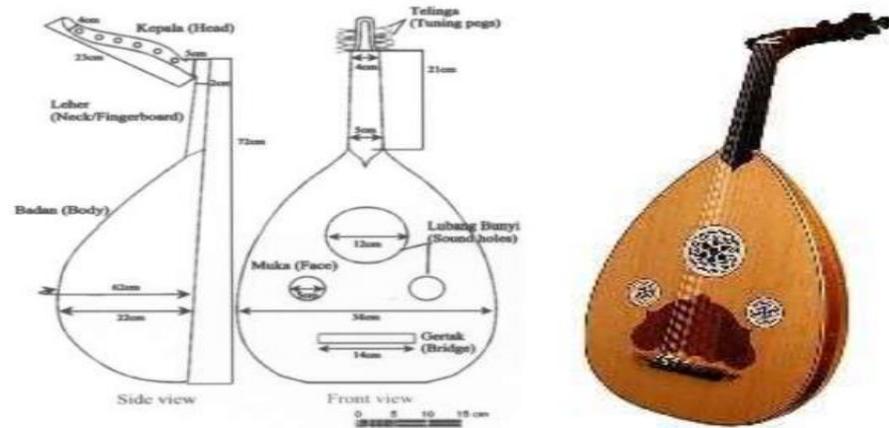
Orkes gambus merupakan salah satu seni pertunjukan musik ansambel terdiri atas beberapa musisi yang memainkan alat musik gambus dan segala instrumen pendukungnya. Seni pertunjukan ini menjadi salah satu bentuk kesenian Islam dengan ciri khas lirik dan syairnya bernuansa Timur Tengah. Orkes gambus ditengarai sudah ada di Indonesia sejak abad ke-19 yang dibawa oleh imigran Arab dari Yaman Selatan dan Hadramaut (Gani dkk., 2019:68). Awal kehadiran orkes gambus ditujukan sebagai bagian dari sarana dakwah budaya Islam. Tujuan ini diperkuat oleh pendapat yang

mengemukakan bahwa seni Islam ini berlandaskan nilai-nilai Islam yang berpegang teguh pada tujuan ketauhidan terhadap Allah SWT (Afrianto, 2022:38).

Seiring berjalannya waktu dan terjadinya dekulturasi di Indonesia karena bergesekan dengan budaya melayu maka nuansa orkes gambus berubah menjadi nuansa melayu dan secara fungsional berubah menjadi sarana hiburan. Lebih dari itu, pesatnya perkembangan orkes gambus hingga pada dekade tersebut telah mencapai beberapa wilayah seperti Sumatera, dan Jawa (Gani dkk., 2019:68). Beberapa pendapat mengatakan bahwa eksistensi orkes gambus sejak tahun 1940-an hingga 1960-an menjadi cikal bakal musik dangdut di Indonesia. Menariknya, aktivitas dalam seni pertunjukan ini mampu mempererat solidaritas sosial di masyarakat.

Kesenian musik orkes gambus dapat dibedakan dengan jenis musik ansambel lainnya melalui penggunaan alat musik gambus yang khas. Adapun menurut Irawan, (2020:30) gambus yang berkembang di Indonesia terdiri atas dua jenis yaitu gambus Arab dan gambus Melayu.

1. Gambus Arab yaitu gambus berbentuk separuh bulatan telur dengan seluruh bagiannya berupa kayu, memiliki leher berukuran pendek, dan bagian depan datar. Gambus ini juga memiliki beragam nama lokal seperti gambus Hadramaut, gambus Balak, gambus Bibar, dan gambus Palembang.



Gambar 2. Gambus Arab
Sumber: Irawan, (2020)

2. Gambus Melayu yaitu jenis gambus yang paling banyak tersebar di Indonesia sehingga memiliki nama lokal yang juga banyak diantaranya gambus Lunik, gambus Lappung (Lampung), gambus Buha, kecapi dan masih banyak lagi. Gambus Melayu memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan gambus Arab dan terbuat dari kayu utuh.



Gambar 3. Gambus Melayu
Sumber: Arman, (2018)

Pada tahun 1970-an orkes gambus telah hadir di Lampung khususnya wilayah pesisir termasuk di Lampung Barat. Puncak eksistensi orkes gambus Lampung adalah pada tahun 1970 hingga awal tahun 2000 (Prayoga dkk., 2022:258). Di Lampung Barat orkes gambus pertama kali hadir pada

tahun 1972 yang dibawa oleh seorang seniman bernama Juntawi (Maheswara, 2021:69). Sanggar orkes gambus yang pertama kali terbentuk berada di Pekon/Desa Cangu, Kecamatan Batu Brak yaitu orkes gambus HRK (Himpunan Remaja Karya) Cangu. Sanggar ini menjadi salah satu grup tertua dan masih eksis hingga saat ini. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan Meriwijaya & Luth, (2021:67) orkes gambus yang tersebar di Lampung Barat berjumlah 42 grup yang terdiri atas grup senior dan junior.

Pada awal kehadirannya orkes gambus di Lampung Barat merupakan orkes dengan nuansa melayu. Namun seiring berjalannya waktu orkes gambus ini cenderung bernuansa dangdut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Prayoga dkk., (2022:259) dalam penelitiannya bahwa pasca tahun 1980-an orkes gambus yang berkembang di Lampung Barat telah merubah bentuk sajiannya dengan nuansa dangdut dan hingga saat ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Meskipun kesenian musik ini merupakan adopsi dari budaya musik luar sebagaimana telah dipaparkan di muka, masyarakat Lampung Barat, kerap kali memanfaatkannya sebagai pagelaran hiburan yang mencirikan adat daerah. Pagelaran tersebut dapat di jumpai pada setiap kegiatan *tayuhan/nayuh* (perkawinan, khitanan), malam bujang gadis, dan bahkan di festival besar seperti Festival Sekala Brak, *Pesagi Culture*, dan lainnya.

Tabel 3. Karakteristik Gambus Arab, Gambus Melayu, dan Gambus Lampung Barat

Gambus Arab	Gambus Melayu	Gambus Lampung Barat
Instrumen alat musik meliputi biola, gendang, tabla, dan seruling.	Instrumen alat musik meliputi gambus, biola, gendang, dan tamborin.	Instrumen alat musik merupakan perpaduan antara gambus Arab dan gambus Melayu.
Lirik lagu yang dibawakan berbahasa arab dan mengandung pesan keagamaan.	Lirik lagu yang dibawakan berbahasa Melayu dengan irama Timur Tengah.	Lirik lagu merupakan penggabungan antara irama Melayu dangdut dan lirik berbahasa Lampung, dengan nuansa yang tercipta adalah melayu dangdut.
Orkes ini biasa disajikan dalam tradisi dan acara komunitas Arab-Indonesia.	Orkes ini biasa disajikan untuk mengiringi tarian tradisional Melayu.	Orkes gambus ini biasa disajikan pada tradisi dan acara besar masyarakat Lampung seperti <i>Tayuh</i> , dan event kebudayaan.

Sumber: Diolah Peneliti, (2024)

Hal yang menonjolkan nuansa dangdut pada kesenian musik orkes gambus Lampung Barat adalah instrumen pertunjukan yang digunakan yaitu Gambus, Kendang Ketipung, Piul/Biola, Tamborin, dan Bas Elektrik. Adapun instrumen tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Gambus, merupakan alat musik yang diklasifikasikan kedalam jenis *chordophone* dengan bentuk bulatan telur dengan seluruh bagiannya berupa kayu, memiliki leher berukuran pendek, dan bagian depan datar.



Gambar 4. Gambus

2. Kendang Ketipung merupakan alat musik yang diklasifikasikan kedalam jenis *membranophone* dan biasa digunakan dalam musik dangdut. Kendang yang digunakan berjumlah dua buah yang dimainkan dengan cara dipukul dengan kedua tangan.



Gambar 5. Kendang Ketipung

3. Piul/Biola merupakan alat musik yang diklasifikasikan ke dalam jenis *chordophone* dengan bentuk sebagaimana biola pada umumnya. Alat musik ini yang memberikan irama melodi pada permainan orkes gambus.



Gambar 6. Piul/Biola

4. Tamborin merupakan alat musik yang diklasifikasikan ke dalam jenis *idiophone* dan terbuat dari bingkai kayu atau plastik beserta lempengan bulatan besi yang menghasilkan suara gemerincing. Alat musik ini dimainkan dengan cara di goyang atau dipukul ke salah satu tangan.



Gambar 7. Tamborin

5. Bas Elektrik merupakan alat musik yang diklasifikasikan ke dalam jenis *elektrophone* yang memungkinkan sumber bunyi berasal dari rekayasa elektronik.



Gambar 8. Bas Elektrik

Berdasarkan penggunaan instrumen tersebut khususnya pada kendang ketipung, tamborin, dan gambus yang merupakan jenis alat musik khas dangdut membuktikan bahwa kesenian musik gambus Lampung Barat bernuansa dangdut.

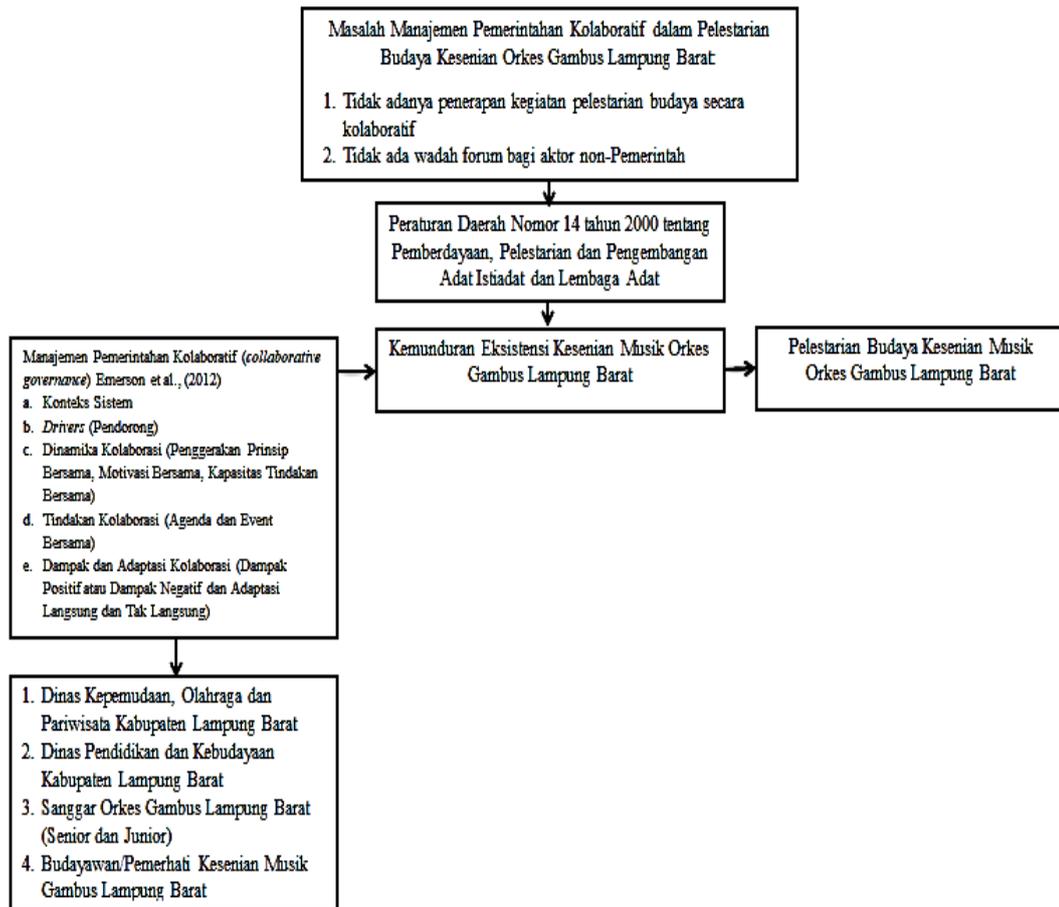
2.5 Kerangka Pikir

Pelestarian budaya merupakan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional di masyarakat yang telah membudaya secara berkelanjutan dan sebagai wujud revitalisasi kebudayaan melalui penyadaran dan perencanaan secara kolektif. Pemerintah merupakan aktor kunci yang memiliki peranan penting untuk menjalankan fungsi dalam pelestarian budaya. Demikian halnya untuk menjaga eksistensi kesenian musik orkes gambus Lampung dibutuhkan peranan yang besar dari pemerintah dalam manajemen sistem pemerintahan agar mampu mendorong masyarakat dalam pelestarian budaya. Peran tersebut dapat dilihat dari upaya menjalin kolaborasi dengan

pemangku kepentingan untuk melakukan pelestarian budaya kesenian musik orkes gambus Lampung di Lampung Barat.

Namun, permasalahannya adalah pada dua dekade terakhir (tahun 2000-2017) peran pemerintah justru mempengaruhi kemunduran eksistensi kesenian musik gambus Lampung Barat. Hal ini karena ketiadaan inisiasi pemerintah dalam memaksimalkan peranannya untuk menghadirkan kegiatan pelestarian budaya serta tidak ada wadah forum bagi aktor non-pemerintah untuk saling berkolaborasi. Adapun pada penelitian ini, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah adalah bagaimana manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat? dan bagaimana masalah manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat?

Pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dalam penelitian ini dianalisis menggunakan konsep *collaborative governance* Emerson et al., (2012:10). Konsep ini digunakan untuk mengkaji manajemen pemerintahan secara kolaboratif dengan indikator konteks sistem, *drivers* (pendorong), dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi kolaborasi dalam pelestarian budaya kesenian musik orkes gambus Lampung Barat. Maka dari itu, berdasarkan uraian tersebut kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 9. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Metode kualitatif menekankan pada peran peneliti sebagai instrumen penelitian oleh karena itu peneliti terlibat langsung dengan realitas di lapangan. Metode kualitatif memiliki kecenderungan pada analisis yang memungkinkan data diarahkan pada pola atau teori yang mendeskripsikan suatu fenomena (Hardani dkk., 2020:18). Penelitian kualitatif juga menggunakan pendekatan interpretatif sehingga mampu memberikan deksripsi dan penjelasan atas suatu fenomena secara mendalam. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti mengkaji, memahami, dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam menggunakan metode kualitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Barat. Pemilihan lokasi didasari oleh keberadaan fenomena kemunduran hingga kebangkitan kesenian musik orkes gambus Lampung secara cepat dan terstruktur dengan baik yang hanya terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Oleh karena itu, peneliti memilih Kabupaten Lampung Barat sebagai lokasi penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting dalam penelitian guna membatasi masalah yang hendak diteliti meskipun bersifat sementara dan terus berkembang sewaktu penelitian. Fokus penelitian pada penelitian kualitatif berdasarkan

realitas di lapangan yang bertujuan untuk memahami dan mendalami penelitian yang dilakukan secara terfokus (Sugiyono, 2013:11). Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manajemen pemerintahan kolaboratif yang dibangun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus.
 - a. Konteks sistem
 - b. *Drivers* (pendorong)
 - c. Dinamika Kolaborasi
Pada aspek ini dilihat dari indikator pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas tindakan bersama.
 - d. Tindakan Kolaborasi
Peneliti melihat tindakan kolaborasi dari indikator agenda dan event bersama.
 - e. Dampak dan Adaptasi Kolaborasi
Aspek dampak dan adaptasi kolaborasi dilihat dari indikator dampak yang dihasilkan yang terdiri atas dampak positif atau dampak negatif. Adapun adaptasi dilihat dari indikator adaptasi langsung atau tak langsung.
2. Masalah manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat.

3.4 Penentuan Informan

Informan penelitian merupakan seseorang yang memiliki pemahaman terkait informasi penelitian sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber data penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Identitas Informan

No	Instansi/Organisasi	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Peran/Posisi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Riady Andrianto, SH	45	PNS	Barak Pemda Liwa No. F 5 Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Kepala Bidang Kebudayaan
2	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Endang Guntoro, S.H., MM.	43	PNS	Keramian, Pekon Cunggu, Kec. Batu Brak, Kab. Lampung Barat	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Ekonomi Kreatif
3	Budayawan/Pemerhati Budaya	Ahmadi, S.H.	34	PNS	Kelutum, Pekon Gunung Sugih, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Budayawan/Pemerhati Budaya dan Sekertaris Dewan Kesenian Lampung Barat
4	Sanggar Banjar Masin	Ahmad Subhan	51	Wiraswasta	Suka Marga, Pekon Padang Cahya, Kac. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Ketua Sanggar Orkes Gambus Banjar Masin
5	Sanggar Andan Muakhi	Indra Saputra	31	Karyawan Honorer	Sukajaya, Pekon Sebarus, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Ketua Sanggar Orkes Gambus Andan Muakhi

Sumber: Diolah Peneliti, (2024)

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan atas pemahaman orang dengan keterangan atau data yang diperlukan peneliti dalam penelitian. Adapun menurut Lincoln dan Guba dalam Wekke dkk., (2019:46) ciri *Purposive sampling* di antaranya:

- a. Bersifat sementara dan seperti bola salju yang menggelinding
- b. Penyesuaian atau disesuaikan sumber datanya
- c. Data dipilih hingga jenuh

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah strategis yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2013:137). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data terkait dengan manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap suatu fenomena yang diteliti (Wekke dkk., 2019:49). Teknik pengumpulan data dengan observasi sangat berperan besar terhadap proses penelitian, sebab memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena dan mencatat segala peristiwa yang terjadi berkaitan dengan data yang hendak diteliti secara langsung. Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi dalam proses pengumpulan data penelitian terkait dengan manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan tujuan tertentu (Hardani dkk., 2020:137). Wawancara penelitian dalam hal ini dilakukan oleh *Interviewer* atau pewawancara yang mengajukan berbagai pertanyaan dengan *Interviewee* atau orang yang diwawancarai dan memberi jawaban atas pertanyaan pewawancara. Pengumpulan data dengan wawancara diharapkan dapat menghasilkan data dan informasi primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan informan penelitian terkait manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat.

3. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan untuk memahami objek penelitian dengan memanfaatkan referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber literatur berupa artikel, jurnal, skripsi/thesis, buku, maupun foto yang memuat informasi tentang manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga data menjadi jenuh (Miles & Huberman, 1994:10). Adapun komponen teknik analisis data kualitatif terkait dengan manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah serangkaian proses memilah, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasi data yang muncul pada realitas di lapangan berdasarkan catatan penelitian. Kegiatan mereduksi data meliputi penajaman, penggolongan, pengarahannya serta pemilahan bagian yang tidak dibutuhkan dari data yang kemudian diorganisasikan sehingga dapat diverifikasi dan ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan terkait dengan manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat hingga kemudian data tersebut di klasifikasikan secara sederhana.

2. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data merupakan komponen dari analisis data dengan penyajian data hasil reduksi yang telah tersusun sehingga memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk

deskriptif atau teks naratif. Adapun penelitian ini hendak menyajikan data mengenai manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir dalam proses analisis data. Simpulan pada penelitian kualitatif biasanya berupa temuan baru yang belum ada sebelumnya. Pada tahap penarikan kesimpulan data yang diperoleh senantiasa dibuktikan secara berulang dengan tujuan untuk menentukan kredibilitas dan validitas kesimpulan akhir tersebut. Pada penelitian ini, data disimpulkan berkaitan dengan manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu Kabupaten dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung hasil pemekaran daerah dari Kabupaten Lampung Utara sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 17 Tahun 1991. Ibukota Kabupaten Lampung Barat adalah Liwa. Secara astronomi, Kabupaten Lampung Barat terletak antara $4^{\circ} 47' 16''$ sampai $5^{\circ} 56' 42''$ Lintang Selatan dan antara $103^{\circ} 35' 98''$ sampai $104^{\circ} 33' 51''$ Bujur Timur dengan luas wilayah daratan yaitu 2.064,40 km². Kabupaten ini terbagi atas 131 desa/pekon dan 5 kelurahan dan 15 wilayah administrasi kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Balik Bukit dengan ibukota Liwa
2. Kecamatan Sukau dengan ibukota Buay Nyerupa
3. Kecamatan Lumbok Seminung dengan ibukota Lumbok
4. Kecamatan Belalau dengan ibukota Kenali
5. Kecamatan Sekincau dengan ibukota Pampangan
6. Kecamatan Suoh dengan ibukota Sumber Agung
7. Kecamatan Batu Brak dengan ibukota Pekon Balak
8. Kecamatan Pagar Dewa dengan ibukota Basungan
9. Kecamatan Batu Ketulis dengan ibukota Bakhu
10. Kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan ibukota Tri Mekar Jaya
11. Kecamatan Sumber Jaya dengan ibukota Tugu Sari
12. Kecamatan Way Tenong dengan ibukota Mutar Alam
13. Kecamatan Kebun Tebu dengan ibukota Pura Jaya
14. Kecamatan Air Hitam dengan ibukota Sumber Alam
15. Kecamatan Gedung Surian dengan ibukota Gedung Surian



Gambar 10. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Barat
Sumber: RKPD Kabupaten Lampung Barat, (2023)

4.1.1 Kondisi Geografi

Secara Geografis, Kabupaten Lampung Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara - Provinsi Sumatera Selatan
- Barat - Kabupaten Pesisir Barat
- Selatan - Kabupaten Tanggamus
- Timur - Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan.

4.1.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023, komposisi penduduk Kabupaten Lampung Barat adalah 303.397 jiwa yang terdiri atas 146.001 penduduk Perempuan dan 157.396 penduduk Laki-laki. Adapun rerata kepadatan penduduk sekitar 143-144 orang per kilometer persegi. Berikut data persebaran

penduduk berdasarkan kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan 2022, Luas Wilayah per km², Jumlah Penduduk dan kepadatan penduduk per km².

Tabel 5. Komposisi Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel 2022	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk (km ²)
1	Balik Bukit	13	159,41	41,78	262,08
2	Sukau	10	146,07	24,87	170,23
3	Lumbok Seminung	11	98,88	8,06	81,49
4	Belalau	10	93,91	12,54	133,56
5	Sekincau	5	115,09	18,95	164,68
6	Bandar Negeri Suoh	10	267,23	24,73	92,55
7	Batu Brak	11	199,29	15,05	75,54
8	Pagar Dewa	10	197,71	17,42	88,11
9	Suoh	7	150,22	18,53	123,35
10	Batu Ketulis	10	182,01	13,42	73,75
11	Sumber Jaya	5	130,44	24,14	185,04
12	Way Tenong	9	129,70	34,94	269,38
13	Gedung Surian	5	76,96	16,71	217,10
14	Kebun Tebu	10	61,55	20,58	334,38
15	Air Hitam	10	108,12	11,68	107,99
	Total	136	2 116,59	303,40	143,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, (2023)

4.2 Kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki visi yaitu **“Terwujudnya Pendidikan di Lampung Barat yang Merata, Terjangkau dan Berdaya Saing serta Melestarikan Budaya Daerah Lampung Barat sebagai Cerminan Liwa Kota Berbunga”** dengan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas/mutu, relevansi, dan akses masyarakat terhadap pendidikan.
2. Meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan berkompeten.
3. Menyelenggarakan dan melestarikan bahasa, seni, dan budaya daerah Lampung Barat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Lampung Barat memiliki fungsi di antaranya sebagai berikut.

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di Bidang pendidikan dan kebudayaan.

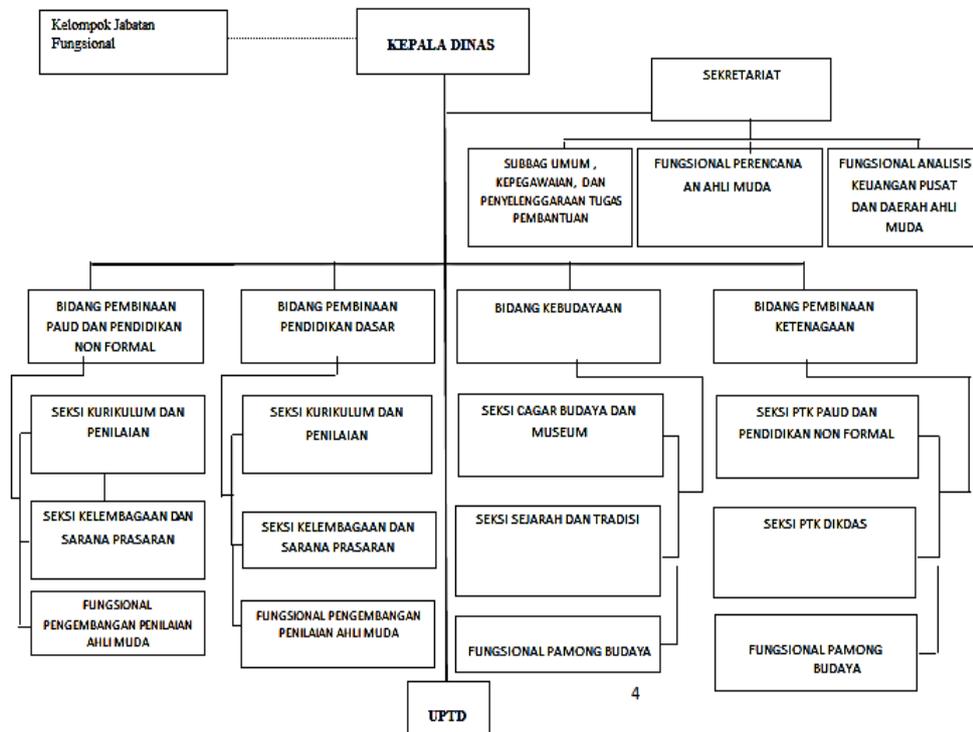
Adapun upaya pelestarian budaya kesenian musik gambus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berada dibawah naungan bidang kebudayaan dengan program kerja sebagai berikut.

1. Program Pengembangan Kebudayaan
 - a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota

- b. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pembinaan Sejarah
Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - a. Penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota

Berikut ini struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

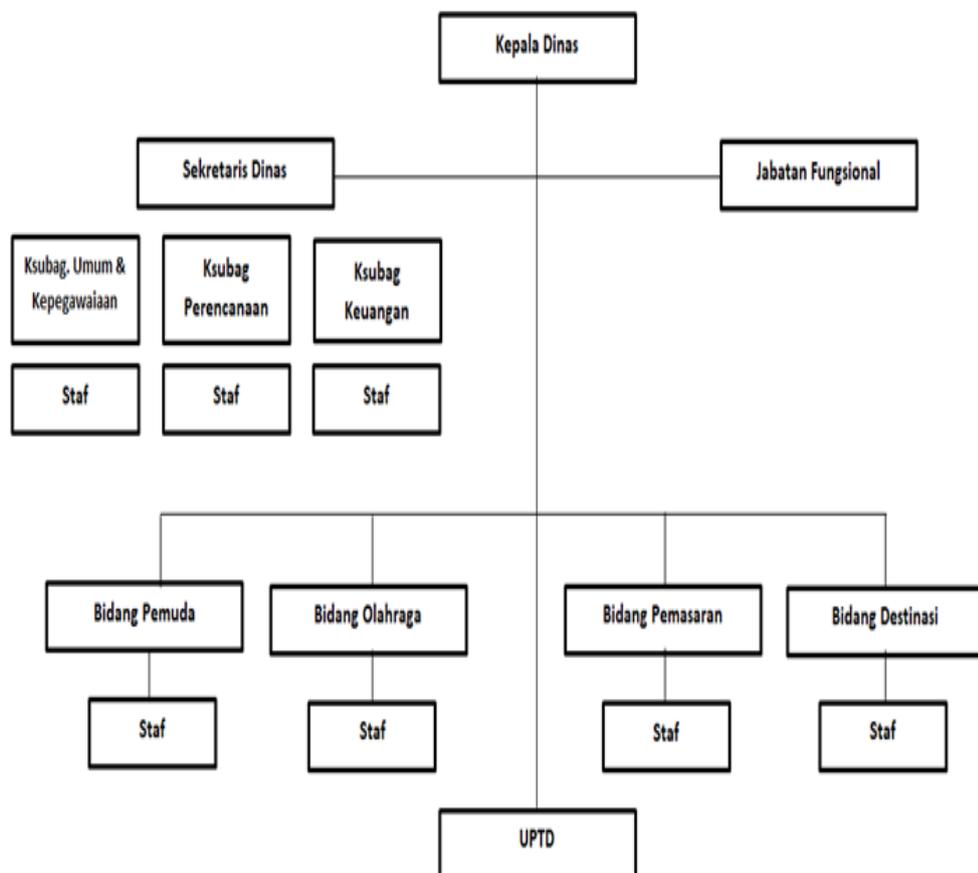
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI NO : 70 TAHUN 2021**



Gambar 11. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

4.3 Kelembagaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada visi Kabupaten Lampung Barat yaitu **“Terwujudnya Lampung Barat Hebat dan Sejahtera”** dengan misi di bidang pariwisata dan kebudayaan yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing; serta mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan *gender* dan partisipatif. Adapun struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata adalah sebagai berikut.



Gambar 12. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat

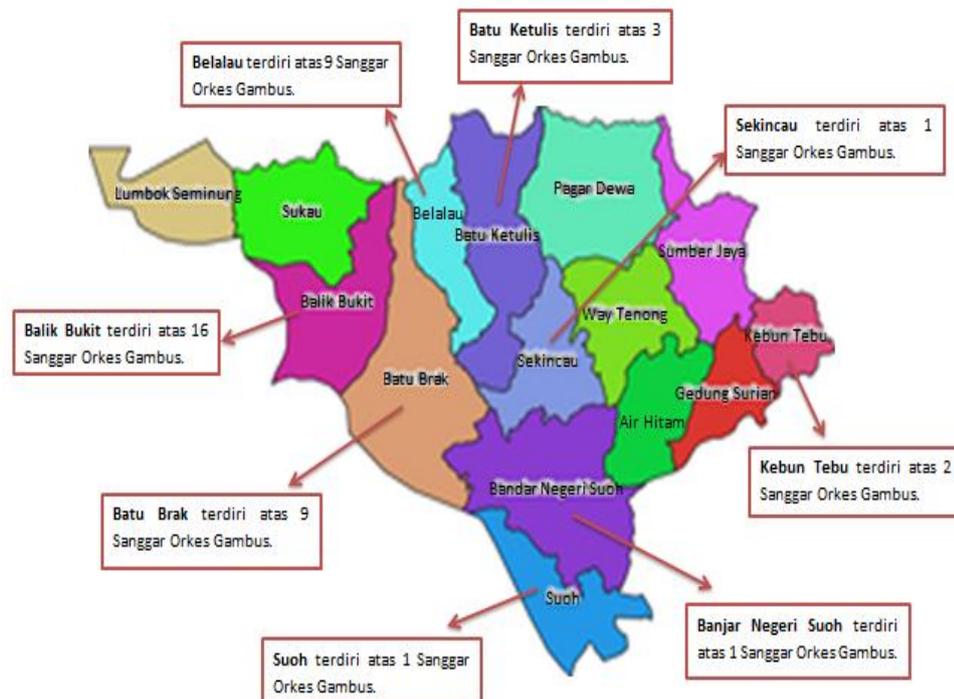
Program Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat di bidang pemasaran berkaitan dengan pelestarian budaya kesenian musik gambus adalah sebagai berikut.

1. Dana hibah kepada sanggar orkes gambus berbadan hukum berdasarkan pengajuan proposal atas nama pemerintah daerah.
2. Festival Budaya Sekala Brak sebagai wadah untuk mendorong daya saing dan promosi seni budaya tradisional kesenian musik gambus Lampung Barat.
3. Hiburan Prioritas dalam rangka memasyarakatkan kesenian musik gambus Lampung Barat pada perhelatan pemerintah daerah.

4.4 Sanggar Orkes Gambus Lampung Barat

Orkes gambus Lampung Barat merupakan seni pertunjukan musik daerah bernuansa melayu dan dangdut sebagai hasil perkembangan dan penyesuaian musik dalam prosesnya. Karakteristik yang menonjol dari kesenian musik ini adalah kolaborasi irama musik melayu yang memiliki syair bercerita tentang kisah romansa, nasihat atau pengalaman kehidupan yang juga dipengaruhi oleh irama gendang dangdut sebagai bagian dari proses perkembangan kesenian musik ini. Adapun instrumen alat musik meliputi gambus, kendang ketipung, *piul*/biola, tamborin, dan bas elektrik.

Kabupaten Lampung Barat memiliki 42 sanggar orkes gambus Lampung yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan yaitu 16 (enam belas) sanggar orkes gambus di Kecamatan Balik Bukit, 1 (satu) sanggar orkes gambus di Kecamatan Banjar Negeri Suoh, 9 (sembilan) sanggar orkes gambus di Kecamatan Batu Brak, 3 (tiga) sanggar orkes gambus di Kecamatan Batu Ketulis, 9 (sembilan) sanggar orkes gambus di Kecamatan Belalau, 2 (dua) sanggar orkes gambus di Kecamatan Kebun Tebu, 1 (satu) sanggar orkes gambus di Kecamatan Sekincau, dan 1 (satu) sanggar orkes gambus di Kecamatan Suoh. Berikut ini peta persebaran sanggar orkes gambus Lampung Barat di setiap Kecamatan.



Gambar 13. Peta Persebaran Sanggar Orkes Gambus Lampung Barat per Kecamatan

Sumber: Diolah Peneliti, (2024)

Pada penelitian ini, sanggar orkes gambus Lampung Barat yang terlibat adalah sanggar orkes gambus Banjarmasin (Junior dan telah berbadan hukum) dan sanggar orkes gambus Andan Muakhi (Senior dan belum berbadan hukum). Berikut ini gambaran umum sanggar orkes gambus tersebut.

4.5.1 Sanggar Orkes Gambus Banjarmasin

Sanggar orkes gambus Banjarmasin merupakan salah satu sanggar kesenian musik gambus di Kabupaten Lampung Barat yang telah berdiri sejak tahun 2016. Pada tahun 2017, sanggar ini memperoleh pengakuan secara hukum dan telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan/LSM dan Nirlaba lainnya berdasarkan Surat Keterangan KESBANGPOL Lampung Barat Nomor 800/IV06/2017 dan Surat Keterangan KEMENKUMHAM RI Nomor

AHU.0006712.AH.01.07 Tahun 2022. Berdasarkan tahun berdirinya, sanggar orkes gambus Banjarmasin masuk dalam kategori sanggar kesenian junior dan telah berbadan hukum. Adapun struktur organisasi sanggar orkes gambus Banjarmasin adalah sebagai berikut.



Gambar 14. Struktur Organisasi Sanggar Banjarmasin Padang Cahya

4.5.2 Sanggar Orkes Gambus Andan Muakhi

Sanggar orkes gambus Andan Muakhi merupakan salah satu sanggar kesenian musik senior yang berdiri tahun 1996. Meskipun masuk dalam kategori senior, sanggar ini belum memiliki legalitas formal atau dengan kata lain masih dikelola dengan swasembada masyarakat Desa/Pekon. Sejak tahun 2018 sanggar orkes gambus Andan Muakhi turut aktif dalam berbagai event kebudayaan daerah termasuk aktif dalam kegiatan latihan rutin dalam se-pekan. Hal ini menunjukkan kontribusi sanggar dalam mengembalikan eksistensi kesenian musik gambus Lampung Barat. Sanggar orkes gambus Andan Muakhi tidak

memiliki struktur organisasi formal, oleh karena itu kepengurusan hanya terdiri atas ketua, bendahara dan anggota. Adapun sanggar di ketuai oleh Indra Saputra dan Bendahara sanggar Melda Nuryana.



Gambar 15. Pentas Budaya Sanggar Orkes Gambus Andan Muakhi

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

a. Manajemen Pemerintahan Kolaboratif dalam Pelestarian Budaya Kesenian Musik Gambus Lampung Barat

Pelestarian budaya dianggap sebagai bagian integral dalam struktur sosial masyarakat yang memiliki peranan signifikan. Kepentingan ini diakui sebagai agenda publik yang tidak dapat sepenuhnya diemban oleh otoritas pemerintah semata, namun memerlukan kerjasama lintas sektor. Pada pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat telah diimplementasikan model manajemen pemerintahan kolaboratif yang melibatkan aktor pemerintah, sanggar orkes gambus, dan budayawan/pemerhati budaya. Analisis terhadap data empiris menunjukkan bahwa pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat telah memenuhi elemen dimensi kolaborasi.

Pra kondisi awal yang mengarahkan pada proses kolaborasi adalah krisis manajemen kolaboratif sebagai akibat tidak terimplementasikannya kerangka kebijakan dan hukum yang mengikat terkait pelestarian budaya kesenian musik gambus. Implementasi model kolaboratif ini didorong oleh kehadiran pemerintah sebagai fasilitator utama untuk memfasilitasi insentif yang bersumber dari dana hibah. Selain itu, rasa saling ketergantungan yang didasari dengan internalisasi nilai timbal balik, dan kesadaran responsibilitas bersama juga menjadi pendorong proses kolaborasi.

Keterpenuhan dalam konteks dinamika kolaborasi dapat dilihat dari tiga komponen utama yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas tindakan bersama. Tujuan bersama untuk melestarikan kesenian musik gambus hingga membawa dampak sosial-ekonomi yang lebih luas telah disepakati melalui diskusi bersama secara informal. Pada dimensi ini motivasi bersama terpenuhi dengan berkomitmen untuk memberikan fasilitas, pendampingan, dan konsisten mengaktifkan aktivitas berkesenian. Kolaborasi ini juga memenuhi kapasitas tindakan bersama, termasuk pengaturan institusional dalam struktur intra-organisasi, kepemimpinan oleh pemerintah daerah sebagai fasilitator, dan internalisasi pengetahuan tentang pentingnya manajemen kolaboratif dalam menjaga eksistensi kesenian musik gambus.

Komponen dinamika kolaborasi ini mendorong terjadinya tindakan kolaborasi seperti penyelenggaraan event kebudayaan Festival Sekala Brak, yang memberikan dampak positif bagi penguatan proses kolaborasi dan pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat. Dampak kolaborasi ini mencakup solidaritas sosial, timbal balik, dan pemeliharaan eksistensi kesenian musik gambus Lampung Barat. Sementara itu, adaptasi kolaborasi dilakukan untuk mempertahankan pola kolaborasi secara masif dan terstruktur. Meskipun demikian, proses kolaborasi ini perlu didukung dengan pemenuhan pengaturan prosedural.

b. Masalah Manajemen Pemerintahan Kolaboratif dalam Pelestarian Budaya Kesenian Musik Gambus Lampung Barat

Tantangan yang dihadapi dalam konteks manajemen pemerintahan kolaboratif dalam pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat adalah terjadinya kesalahpahaman (*missunderstanding*), yang muncul akibat perbedaan budaya di antara

para aktor kolaborasi yang mungkin kurang sensitif terhadap komunikasi lintas budaya. Selain itu, dinamika manajemen administrasi pemerintah yang tidak sederhana terhadap proses pembentukan sanggar orkes gambus berbadan hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini karena status berbadan hukum pada sanggar menjadi prasyarat memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah melalui dana hibah. Lebih lanjut, egoisme turut melengkapi tantangan yang dihadapi dalam manajemen kolaboratif. Egoisme merujuk pada perbedaan cara pandang untuk mencapai tujuan bersama dan perbedaan kepentingan aktor kolaborasi. Namun, tantangan ini dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi pendorong bagi proses kolaborasi.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, beberapa saran yang perlu menjadi pertimbangan di antaranya sebagai berikut.

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat

1. Mendorong terbentuknya pengaturan prosedural dan deliberasi formal secara rutin bersama dengan aktor kolaborasi berkaitan dengan pelestarian budaya, khususnya kesenian musik gambus.
2. Mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya komunikasi lintas budaya dan sensitivitas aktor dalam mendukung kolaborasi pelestarian budaya kesenian musik gambus Lampung Barat.
3. Mendorong keberlanjutan manajemen pemerintahan kolaboratif dalam kebijakan pelestarian budaya kesenian musik gambus di Kabupaten Lampung Barat.

Kepada Peneliti di masa mendatang

Melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam berkaitan dengan manajemen pemerintahan kolaboratif dalam objek pelestarian budaya yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh. T. (2016). Perspektif Governance dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan. *Jurnal Analis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), 65–72. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v2i1.1522>
- Afandi, S. A., Lestari, R., & Afandi, M. (2021). Collaborative Governance in Preserving the Malay Culture of Riau. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(2), 483–500. <https://doi.org/doi:10.26811/peuradeun.v9i2.525>
- Afrianto, B. (2022). Akulturasi Budaya pada Orkes Irama Padang Pasir di Kota Binjai. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social and Arts (LWSA)*, 5(5), 37–43. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v5i5.165>
- Amrizal, A. (2014). Peranan Musik Klasik dan Musik Pop dalam Pembelajaran. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 20(76), 1–5. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v20i76.3437>
- Anggraeni, E. R., Yanuartuti, S., Juwariyah, A., Yermiandhoko, Y., & Lodra, I. N. (2022). Musik Oklik Bojonegoro dalam Kajian Etnomusikologi sebagai Upaya Pelestarian Budaya. *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.24114/gondang.v6i1.30685>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arman, D. (2018, July 12). Mengenal Gambus Selodang, Gambus Melayu. *Indonesiana*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/mengenal-gambus-selodang-gambus-melayu/>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, Abd. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (1st ed.). Program Studi Doktor Administrasi Publik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. (2023). Kabupaten Lampung Barat dalam Angka 2023. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat*, 18010.2303, 234.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

- Gani, I. A., Sriwulan, W., & Asril, A. (2019). Dekulturasi Bentuk Seni Pertunjukan Orkes Gambus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Seni Musik*, 8(1), 67–73. <https://doi.org/10.15294/jsm.v8i1.28009>
- Hajriana, R. A. (2022). *Analisis Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Adat Rambu Solo' Suku Toraja di Kabupaten Toraja Utara* [Universitas Hasanuddin]. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/14602/>
- Hakim, A. (2022). Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Tradisi Lisan Iko-Iko Suku Bajau Di Sulawesi Tenggara. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(1), 118–124. <https://doi.org/10.47650/jglp.v4i1.386>
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (1st ed.). CV. Pustaka Ilmu. <https://www.pustakailmu.co.id>
- Huxham, C., Vangen, S., Huxham, C., & Eden, C. (2000). The challenge of collaborative governance. *Public Management an International Journal of Research and Theory*, 2(3), 337–358. <https://doi.org/10.1080/14719030000000021>
- Irawan, R. (2020). Terminologi Gambus dalam Spektrum Musik di Indonesia. *Journal of Music Science, Technology, and Industry*, 3(1), 25–41. <https://doi.org/10.31091/jomsti.v3i1.961>
- KejarFakta.co. (2019, November 2). Pemkab Lampung Barat Berupaya Bangkitkan Kembali Gairah Seni Budaya Daerah “Orkes Gambus Lampung.” *KejarFakta.co*. <https://lampung.kejarfakta.co/seni-dan-budaya/8489/pemkab-lampung-barat-berupaya-bangkitkan-kembali-gairah-seni-budaya-daerah-orkes-gambus-lampung>
- Kistanto, N. H. (2017). Tentang Konsep Kebudayaan. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 10(2), 1–11. <https://doi.org/10.14710/sabda.10.2.%25p>
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi* (5th ed.). Aksara Baru.
- Kurnianto, A. M., Indrianti, D. T., & Arienfianto, L. (2019). Peran Sanggar Seni Pemuda Edi Peni Dalam Pelestarian Budaya Lokal Di Desa Hadiluwih Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3(2), 201959–201965. <https://doi.org/10.19184/jlc.v3i2.16803>
- lampungbaratkab.go.id. (2023, June 18). Karisma Event Nusantara Festival Budaya Sekala Brak Pemkab Lambar Tahun 2023 Resmi Dibuka. lampungbaratkab.go.id. <https://lampungbaratkab.go.id/home/2023/06/18/karisma-event-nusantara-festival-budaya-sekala-bekhak-pemkab-lambar-tahun-2023-resmi-dibuka/#comments>

- lo, M.-U. (2019). Collaboration between practitioners and public agencies in preserving and promoting the musical heritage in Macao. *Journal of Heritage Tourism*, 14(1), 19–32.
<https://doi.org/10.1080/1743873X.2018.1452248>
- Maheswara, F. (2021). Grup Orkes Gambus Dian Utama di Pekon Padang Dalam, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. *Slonding Jurnal Etnomusikologi*, 17(2), 65–82. <https://doi.org/10.24821/sl.v17i2.3729>
- mediamerdeka.co. (2018). Bupati Lambar Buka Festival Sekala Brak Ke V. *mediamerdeka.co*. <https://mediamerdeka.co/2018/07/10/bupati-lambar-buka-festival-sekala-brak-ke-v/>
- Meriwijaya, M., & Luth, L. (2021). Upaya Pelestarian Kesenian dan Budaya Lokal di Kabupaten Lampung Barat. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(1), 80–97. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.86>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Mukhlis, M., & Mushtofa, I. (2020). *Kolaborasi Penanggulangan Radikalisme Berbasis Pondok Pesantren*. Idea press Yogyakarta.
- Nahak, H. M. I. (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 165–175.
<https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Nisa, N. K. (2022). *Makna Sosial Budaya Arsitektur Tradisional Lamban Kepaksian Sekala Brak* [Universitas Lampung].
<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/61771>
- Nisa, N. K. (2023, February 13). Orkes Gambus Lampung: Wadah Silaturahmi Masyarakat. *Harian Momentum*.
<https://harianmomentum.com/read/45963/harian-momentum-edisi-13-februari-2023>
- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. (2022). *Bupati Lampung Barat Membuka Secara Langsung Kharisma Event Nusantara Festival Sekala Bekhak VIII*.
<https://lampungbaratkab.go.id/home/2022/07/11/bupati-lampung-barat-membuka-secara-langsung-kharisma-event-nusantara-festival-sekala-bekhak-viii/>
- Permana, P. T., & Hernanda, A. H. (2021). Eksistensi Pertunjukkan Orkes Gambus di Kenali Lampung Barat. *Journal Music Education and Performing Arts (JMEPA)*, 1(2), 1–13.
- Pratama, W., Dewayani, E., & Rusdi, Z. (2020). Sistem Informasi Warisan Budaya Takbenda Studi Kasus: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi*, 8(1), 177–185.
<https://doi.org/10.24912/jiksi.v8i1.11493>

- Prayoga, M. R. D., Barnawi, E., & Pamungkas, B. (2022). Orkes Gambus Himpunan Remaja Karya di Canggü, Batu Brak, Lampung Barat. *Journal of Music Science, Technology, and Industry*, 5(2), 257–275. <https://doi.org/10.31091/jomsti.v5i2.2136>
- Priatna, Y. (2017). Melek informasi sebagai kunci keberhasilan pelestarian budaya lokal. *Publication Library and Information Science*, 1(2), 37–43.
- Putut, A. (2017, August 7). Lampung Barat Gelar Festival Sekala Brak 24-27 Juli 2017. *batampos.co.id*. <https://batampos.co.id/2017/07/08/lampung-barat-gelar-festival-sekala-brak-24-27-juli-2017/>
- RKPD Kabupaten Lampung Barat. (2023). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023* (p. 551). Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. <https://lampungbaratkab.go.id/home/wp-content/uploads/2023/06/RKPD-2023-Lambar-Buku-I.pdf>
- Sari, D. C., Siregar, R. T., Silalahi, M., Butarbutar, M., Silitonga, H. P., Alam, H. V., Abidin, A. Z., Falimu, F., & Rahmat, A. (2020). *Manajemen Pemerintahan* (1st ed.). Ideas Publishing.
- Sari, Y. K., Maria, A. S., & Hapsari, R. R. (2020). Kolaborasi Kreatif Kegiatan Pariwisata Dan Pelestarian Budaya Di Taman Budaya Yogyakarta (Tby). *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality, and Recreation*, 3(1), 85–101. <https://doi.org/10.17509/jithor.v3i1.21853>
- Schöttle, A., Haghsheno, S., & Gehbauer, F. (2014). Defining Cooperation and Collaboration in The Context of Lean Construction. *22nd Annual Conference of the International Group for Lean Construction*, 1269–1280.
- Seka, F. M. S., Juanda, J., & Labolo, M. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 14(2), 97–106. <https://doi.org/10.54783/jv.v14i2.575>
- Setiawan, B. (2021, August 29). Orkes Gambus dan Nyambai Digelar Secara Virtual. *Medialampung*. <https://medialampung.disway.id/read/45281/orkes-gambus-dan-nyambai-digelar-secara-virtual>
- Setiawan, I. (2013). Strategi Kolaborasi dalam Seni Pertunjukan Tradisional di Kabupaten Subang. *Patanjala*, 5(2), 1–20. <http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v5i2.146>
- Situngkir, B., Lubis, Z., & Kadir, A. (2020). Peluang Pelaksanaan Manajemen Kolaboratif dalam Pengembangan Kawasan Situs Kota Cina sebagai Potensi Pariwisata di Kota Medan. *Perspektif*, 9(2), 149–167. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3295>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (19th ed.). Alfabeta.

- Sulaeman, M. Y., Abdal, A., & Engkus, E. (2022). Penerapan Collaborative Governance dalam Pelestarian Budaya di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6677–6690.
<https://doi.org/10.47492/jip.v3i6.2130>
- Suyatna, U. (2009). Kondisi Empiris dan Tantangan Administrasi Negara di Masa Depan. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 13–24.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v11i3.5422>
- Wahyudi. (2020, September 15). Kabid Riadi Ungkap 10 Unsur Pengembangan Kota Budaya. *waktuindonesia.id*.
<https://waktuindonesia.id/2020/09/15/kabid-riadi-ungkap-10-unsur-pengembangan-kota-budaya/>
- Wekke, I. S., Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Gawe Buku.